

4

Kondisi Pembangunan Perkotaan dan Potret Kemiskinan Kota (Studi Kasus : Kota Jakarta)

4.1. Pembangunan Kota Jakarta

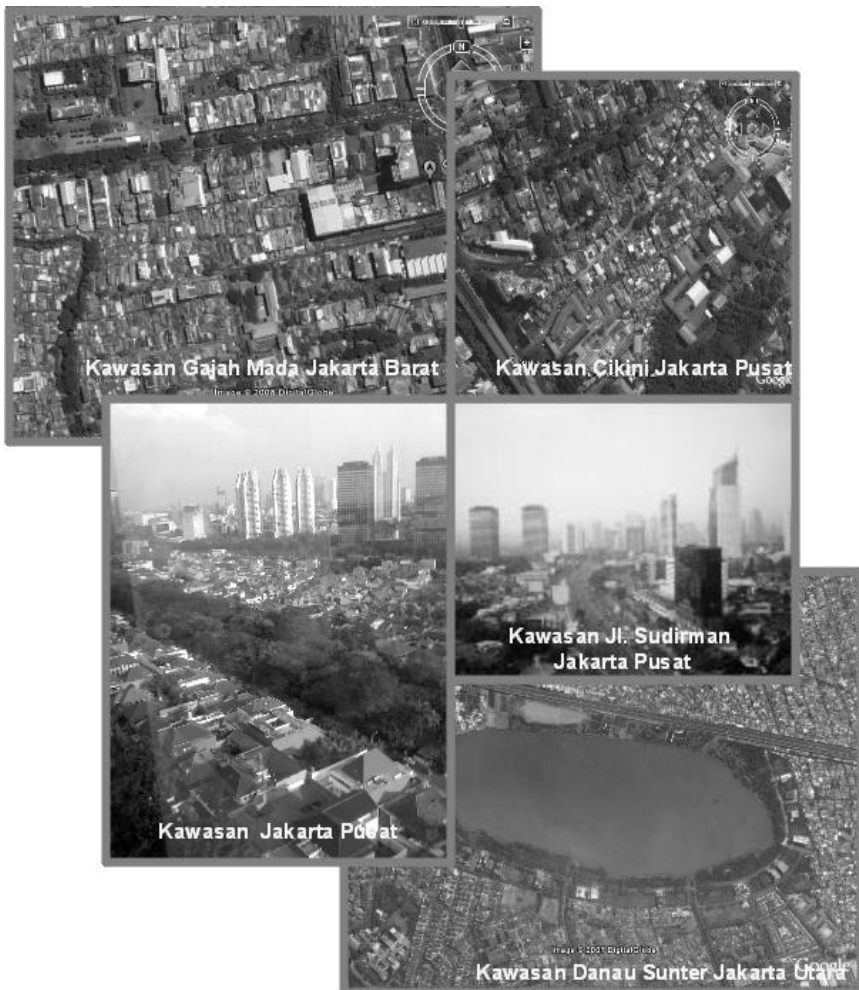
Pembangunan Kota Jakarta (Periode 2001-2007), merupakan suatu proses interaksi antara kegiatan ekonomi, kegiatan sosial/budaya, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh masyarakat di dalam suatu ekosistem perkotaan.

Menurut Nas & Grijns (2007:2) bahwa Kota Jakarta dipandang sebagai 3 aspek, yaitu: (1) sebuah materi ciptaan manusia dan lingkungan alami; (2) sebuah komunitas sosial-budaya; dan (3) sebuah masyarakat yang tertata. Selanjutnya secara morfologis, menurut Nas & Grijns (2007), Batavia atau Jakarta telah melewati lima tahap pembangunan kota, yaitu:

- a. Tahap pertama: kota dikembangkan menurut ide-ide yang berlaku saat itu tentang kota "ideal".
- b. Tahap kedua: orang-orang Belanda beranjak menjauhi kota lama, melayangkan pandangan ke pinggiran kota baru selatan *Weltevreden*, menyusun rencana sesuai pemikiran elit yang sudah mengalami akulturasi
- c. Tahap ketiga: kotapraja *Meester Cornelis* disatukan dengan Batavia
- d. Tahap keempat: suburbanisasi berlanjut makin ke selatan, dengan pembukaan kawasan Kebayoran

- e. Tahap kelima (akhir): menurut catatan Sujarto yang dikutip Nas & Grijns bahwa suburbanisasi memperoleh dorongan baru dari ledakan hebat pelebaran kota, pembentukan banyak kota baru di dalam maupun luar kawasan metropolitan.

Sejak tahun 1972, Djakarta berganti nama menjadi Jakarta. Kota metropolitan Jakarta ini, berbatasan dengan dengan Kabupaten/Kota Bekasi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bogor dan Depok, serta sebelah Barat dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Hingga saat ini,



Gambar 13. Kondisi Permukiman Padat di Kota Jakarta

lokasi Provinsi DKI Jakarta sangat strategis dan merupakan pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan internasional. Pelabuhan utamanya, Tanjung Priok, merupakan pelabuhan ekspor-impor utama di Indonesia. Dengan demikian tidak mengherankan jika provinsi DKI Jakarta berfungsi pula sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan cakupan layanan nasional dan internasional. Demikian pula daya beli yang besar menyebabkan daerah ini menjadi daerah tujuan utama dari barang dan jasa. Letak geografisnya ini pula yang menyebabkan sejak jaman dahulu Provinsi DKI Jakarta selalu menjadi tujuan utama dari pergerakan barang dan manusia di Indonesia.

Jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 8,96 juta jiwa (Jakarta Dalam Angka 2007), luas wilayah 661,52 km² dengan kepadatan penduduk 13,5 ribu/km², menjadikan provinsi ini (Kota Jakarta) sebagai wilayah terpadat penduduknya di Indonesia (Gambar 13). Tingginya kepadatan penduduk di Kota Jakarta merupakan akibat dari fungsi kota Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi yang terbesar di Indonesia. Perjalanan pembangunan Provinsi DKI Jakarta mengalami pasang surut yang cukup panjang. Berdasarkan penggalan waktu (periodisasi), perjalanan pembangunan tersebut dapat dikategorikan dalam tabel 6.

Tabel 6. *Timeline* Arah Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Periode	Arah Pembangunan
Hingga tahun 1997 <i>Era "loan-based economy"</i>	Pertumbuhan berdasarkan fundamental ekonomi yang lemah terutama ketergantungan pada pinjaman luar negeri yang sangat besar
Periode 1998-2000 <i>Era "Rescue Program"</i>	Masa resesi ekonomi dan krisis multi-dimensional dimana sebagian pranata dan aktivitas ekonomi terhenti karena beban yang terlalu besar
Periode 2001 <i>Era "Rescue-Recovery Program"</i>	Masa penyembuhan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat
Periode 2002-2004 <i>Era "Recovery Program"</i>	Masa pemulihan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, penegakkan supremasi hukum dan peningkatan ketertiban umum, dengan program utama perbaikan infrastruktur sosial-ekonomi dan peningkatan pelayanan publik, disebut juga
Periode 2005-2007 <i>Era "Stabilization Program"</i>	Masa pemantapan kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat, dengan program utama penguatan fundamental sosial dan ekonomi menuju pada kemandirian, kesejahteraan dan keberlanjutan

Untuk mencapai visi pembangunan DKI Jakarta 2002-2007, yaitu: “Terwujudnya Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera dan berbudaya, dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan”, maka telah dicapai beberapa kemajuan di dalam pembangunan kotanya. Beberapa kemajuan yang telah dicapai melalui dimensi-dimensi pembangunan kota, telah dirangkum dalam laporan kinerja pembangunan DKI Jakarta tahun 2002-2007. Dimensi-dimensi tersebut sebagai berikut: (i) pembangunan ekonomi; (ii) pembangunan pendidikan; (iii) pembangunan kesehatan; (iv) pembangunan ketenagakerjaan; (v) rencana tata ruang; dan (vi) perlindungan lingkungan.

4.1.1. Kondisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Bannock *et al* 2004).

Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, dan teknik.

Pembangunan ekonomi kota Jakarta diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Berdasarkan laporan Kinerja Pembangunan DKI Tahun 2002-2007, bahwa dalam periode 2002-2006, pembangunan ekonomi Propinsi

DKI Jakarta tumbuh cukup baik. Ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun (Tabel 6).

Berdasarkan RENSTRADA 2002-2007 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa tahun 2002-2007 merupakan pemulihan kehidupan sosial, politik dan ekonomi (*recovery program*).

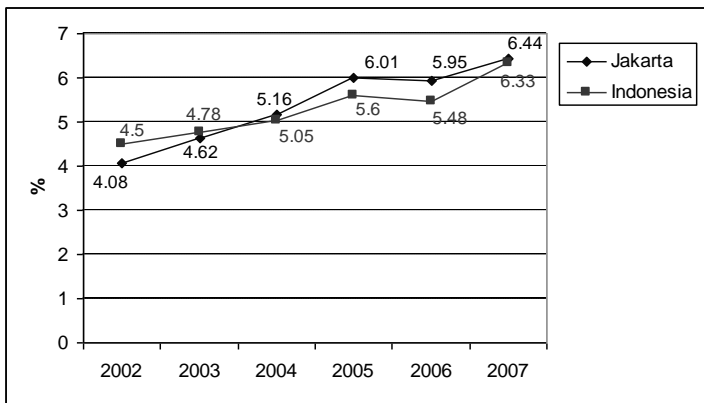
Tabel 7. Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta (2001-2007)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2001	3.64*
2002	4.08*
2003	4.62*
2004	5.16*
2005	6,01*
2006	5,95**
2007	6,44**

*sumber data PROPEDA DKI Jakarta Tahun 2000-2007

**BPS DKI Jakarta Februari 2007

Kecenderungan terjadi bahwa, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta (Kota Jakarta) selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini berarti kegiatan ekonomi sangat intensif terjadi di kota ini dibandingkan dengan kota-kota atau provinsi-provinsi lain di Indonesia (Gambar 14).



Gambar 14. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di DKI Jakarta dan Indonesia Periode 2002-2007

Demikian pula dengan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan laporan Kinerja

pembangunan Provinsi DKI Jakarta 2002-2007 cenderung meningkat dari tahun ke tahun selama periode tersebut. (Tabel 7). Terhitung bahwa, PDRB provinsi DKI Jakarta menyumbang sekitar 16% terhadap PDRB Indonesia.

Tabel 8. PDRB Perkapita dan Perubahan PDRB Per Kapita DKI Jakarta (2002-2006)

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp)		Perubahan PDRB (%)	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
2002	35,302,766	29,461,122	12.85	4.06
2003	39,028,670	30,774,575	10.55	4.46
2004	43,487,399	32,251,227	11.42	4.8
2005	50,146,067	33,940,678	15.31	5.24
2006	59,320,000	35,687,828	14	5.18

Sumber: diolah dari data Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari pentingnya investasi. Dengan meningkatnya investasi bak PMDN dan PMA akan mendorong percepatan roda ekonomi dan sekaligus menyerap tenaga kerja. Namun, dalam laporan Kinerja Pembangunan DKI Jakarta 2002-2007 tercatat bahwa jumlah investasi dari dalam negeri dari tahun 2002-2006 cenderung menurun, sebaliknya jumlah investasi asing cenderung meningkat (Tabel 8).

Tabel 9. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2002-2006

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Investasi (juta Rp)	Proyek	Investasi (Ribuan US \$)
2002	44	2,315,861	561	1,234,429
2003	44	3,343,950	514	5,395,705
2004	35	4,173,915	592	1,867,972
2005	23	3,792,133	796	2,624,156
2006	18	981,710	801	2,635,281

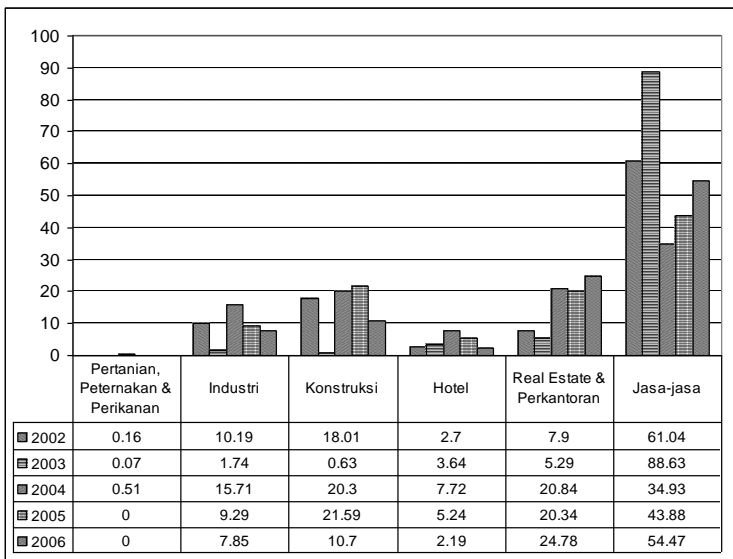
Sumber: Kinerja Pembangunan DKI Jakarta 2002-2007

Akibatnya, tentunya penyerapan tenaga kerja di sektor investasi dalam negeri cenderung berkurang sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor proyek asing cenderung bertambah. Namun, di dalam proyek-proyek yang dikuasai oleh pihak asing, cenderung didominasi oleh tenaga mesin dibandingkan tenaga kerja manusia. Jika terdapat tenaga

manusia, itu pun hanyalah pada tingkatan tenaga ahli, sebagai manajer dalam mengontrol kerja mesin di dalam industri. Sedangkan tenaga buruh telah digantikan oleh tenaga mesin. Berdasarkan laporan Kinerja Pembangunan DKI Jakarta 2002-2007, bahwa pada tahun 2004 penanaman modal asing di DKI Jakarta menurun, ini disebabkan oleh kondisi keamanan di Jakarta yang tidak kondusif, terutama terjadinya ancaman teroris dan konflik sosial lainnya.

Di dalam laporan Kinerja Pembangunan DKI 2002-2007, dilaporkan pula bahwa untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah provinsi DKI Jakarta melakukan perbaikan dan peningkatan pada beberapa hal, seperti:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kemudahan dalam proses perijinan investasi dengan memperpendek jangka waktu penyelesaian melalui pelayanan satu pintu (*one stop service*).
- b. Menghapus semua perijinan yang berpotensi menghambat kegiatan usaha.
- c. Memilih sektor-sektor yang menggerakkan ekonomi.
- d. Memberikan insentif kepada investor atau calon investor yang bergerak pada bidang transportasi dan infrastruktur.

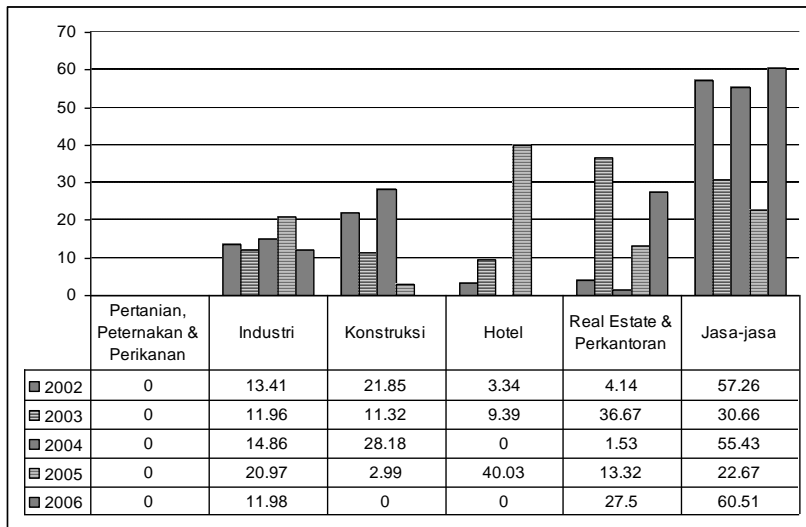


Gambar 15. Persentase Perkembangan PMA menurut sektor tahun 2002-2006 di Kota Jakarta

Tahun 2002, investasi dalam negeri lebih terfokus pada konstruksi dan jasa-jasa lain. Sektor *real estate* dan perkantoran merupakan investasi dalam negeri terbesar pada tahun 2003. Artinya pada tahun 2003 banyak lahan di DKI Jakarta dibangun untuk *real estate* dan perkantoran. Sektor konstruksi memegang peranan yang dominan pada penanaman modal dalam negeri pada tahun 2004, sedangkan tahun 2005, investasi terbesar dialokasikan pada pembangunan hotel, jasa-jasa kemudian sektor industri. Pada tahun 2006, sektor jasa memegang peranan penting dalam penanaman modal dalam negeri, yaitu sebesar 60,61%, kemudian sektor *real estate* dan perkantoran sebesar 27,5% dan industri sebesar 11,98% (Gambar 15).

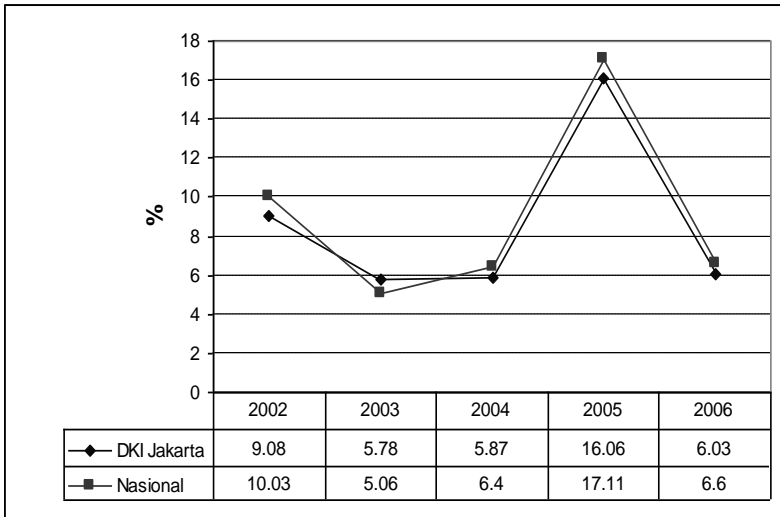
Sektor industri, *real estate* dan perkantoran serta sektor jasa-jasa adalah bidang-bidang yang selalu diminati oleh penanam modal daerah di Kota Jakarta. Dan sektor-sektor ini memerlukan lahan yang luas serta tenaga kerja yang relatif banyak.

Penanam modal asing lebih menyukai sektor jasa-jasa, dari data terlihat bahwa dari tahun 2002-2006 PMA mendominasi sektor jasa-jasa dibandingkan sektor-sektor lain. Kemudian sektor *real estate* dan perkantoran menduduki posisi kedua yang diminati penanam modal asing. Dan sektor ini sejak tahun 2002 sampai tahun 2006 meningkat secara signifikan (Gambar 16).



Gambar 16. Persentase Perkembangan PMDN menurut sektor tahun 2002-2006 di Kota Jakarta

Menurut laporan yang terangkum dalam Kinerja Pembangunan DKI 2002-2007 bahwa pola inflasi DKI Jakarta relatif sama dengan pola inflasi nasional. Inflasi di kota Jakarta dalam kurun waktu 2002-2006 berfluktuatif (Gambar 17).



Gambar 17. Fluktuasi inflasi DKI Jakarta dan Nasional pada tahun 2002-2006

Fluktuasi inflasi di Kota Jakarta dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat seperti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam setahun pada tahun 2005. Respon dari kenaikan BBM adalah kenaikan tarif angkutan kota serta naiknya harga bahan makanan. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat miskin kota Jakarta yang menggunakan angkutan umum saat akan beraktifitas serta daya beli mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok makanan.

Usaha kecil dan menengah sangat mempengaruhi keberterahan masyarakat umumnya masyarakat ekonomi lemah. Usaha kaki lima di Jakarta sejak tahun 2001 sampai tahun 2005 mengalami penurunan drastis. Padahal usaha ini merupakan kelompok UMKM yang menopang sebagian besar kehidupan masyarakat kota Jakarta. Menurut laporan Kinerja Pembangunan DKI Jakarta tahun 2002-2006, bahwa pada tahun 2001 jumlah usaha kakilima mencapai 141.073 usaha dengan tenaga kerja sebanyak 193.314 orang. Pada tahun 2005, jumlah ini berkurang menjadi 97,751 usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 139,394 orang (Tabel 9). Penyebab berkurangnya jumlah

usaha kakilima di Kota Jakarta disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Terjadi penertiban yang dilakukan pemerintah secara besar-besaran pada bulan Oktober 2005.
- b. Penutupan secara permanen beberapa lokasi usaha kaki lima yang memiliki populasi yang besar, yaitu: di lokasi kawasan MONAS, kawadan Gelora Senayan, kawasan Tanah Abang, Sog Jongkok. Di lingkungan Departemen Pertanian dan kawasan Glodok Pasar Baru.

Jika diamati bahwa lokasi berusaha pedagang kakilima yang menempati lokasi usaha tidak resmi (biasanya di trotoar, badan jalan, jalur hijau, lahan parkir/halte, halaman terminal/stasiun, dan lainnya) pada tahun 2001 sebesar 83,83% dan pada tahun 2005 turun menjadi 78,42%.

Tabel 10. Banyaknya Usaha Kakilima di DKI Jakarta Menurut Kotamadya Tahun 2001 dan 2005

Kotamadya	Tahun		Perubahan (%)
	2001	2005	
Jakarta Selatan	35.626	24.620	-30.89
Jakarta Timur	30.007	18.327	-38.92
Jakarta Barat	33.588	19.065	-43.24
Jakarta Utara	19.251	17.212	-10.59
Jumlah	22.601	13.527	-40.15

Sumber: Kinerja Pembangunan DKI Jakarta 2002-2007

4.1.2. Kondisi Pembangunan Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Secara umum angka melek huruf (AMH) penduduk usia 10 tahun (laki-laki dan perempuan) ke atas relatif stabil. Demikian pula angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar cukup baik (Tabel 11).

Tabel 11. Persentase Tingkat Melek Huruf Penduduk Usia 10 tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta (2000-2006)

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)
2000	97.75	95.55
2001	97.47	96.12
2002	98.38	97.48
2003	99.53	99.44
2004	98.44	97.67
2005	98.48	97.6
2006	98.34	97.6

Sumber: Indikator Data Makro Ekonomi dan Sosial Tahun 1997-2006 (Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007 - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)

Lebih dari 90% penduduk usia 7-15 telah mengikuti pendidikan dasar dan ini merupakan target pemerintah Indonesia. Namun, angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 16-18 tahun hanya berkisar 60-71% (Tabel 12).

Tabel 12. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah di DKI Jakarta (2002-2006)

Tahun	Kelompok Umur		
	7-12	13-15	16-18
2002	97.63	92.24	68.26
2003	98.21	91.81	71.57
2004	98.4	92.63	70.36
2005	97.99	92	60.82
2006	98.46	90.16	60.26

Sumber: diolah dari data Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007

4.1.3. Kondisi Pembangunan Kesehatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007, bahwa rata-rata angka kematian bayi (AKB) dari tahun 2000-2006 menurun. Namun AKB laki-laki masih lebih tinggi dari AKB perempuan, yaitu: 16,5% dibandingkan 11,8% (Tabel 13).

Tabel 13. Persentase Angka Kematian Bayi di DKI Jakarta (2000-2006)

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Rata-rata
2000	25	19	22
2001	24	17	20.5
2002	23	16	19.5
2003	21	15	18

Lanjutan tabel 13

Tahun	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Rata-rata
2004	20	14	17
2005	16.5	11.8	14.5
2006	0	0	13.7*

Sumber: diolah dari data Indikator kesejahteraan rakyat DKI Jakarta, 2001,2002, 2003, 2004, 2005

* data dari Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007

Angka harapan hidup laki-laki dan perempuan meningkat dari tahun 2001-2005, namun, AHH laki-laki masih lebih rendah dari pada AHH perempuan, yaitu: 71,7 dan 75,5. Jadi perempuan masih memiliki rentang waktu kehidupan yang lebih panjang dibandingkan laki-laki (Tabel 14).

Tabel 14. Angka Harapan Hidup Laki-laki dan Perempuan di Kota Jakarta (2001-2005)

Tahun	Angka Harapan Hidup (%)	
	Laki-laki	Perempuan
2001	70.39	74.24
2002	70.82	74.65
2003	71.19	75
2004	71.58	75.36
2005	71.7	75.5

Sumber: diolah dari data Indikator kesejahteraan rakyat DKI Jakarta, 2001,2002, 2003, 2004, 2005

Rata-rata penduduk DKI Jakarta mengalami lamanya sakit rata-rata 4,47 hari pada tahun 2002 dan tahun 2006 menurun menjadi rata-rata 4,01 hari (Tabel 15).

Tabel 15. Angka Kesakitan (Morbidity Rate) Penduduk DKI Jakarta (2002-2006)

Tahun	Angka Kesakitan (%)	Rata-rata Lama Sakit (Hari)
2002	15.22	4.47
2003	17.25	4.35
2004	17.54	4.28
2005	15.19	4.17
2006	18.59	4.01

Sumber: diolah dari data Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007

4.1.4. Kondisi Pembangunan Ketenagakerjaan

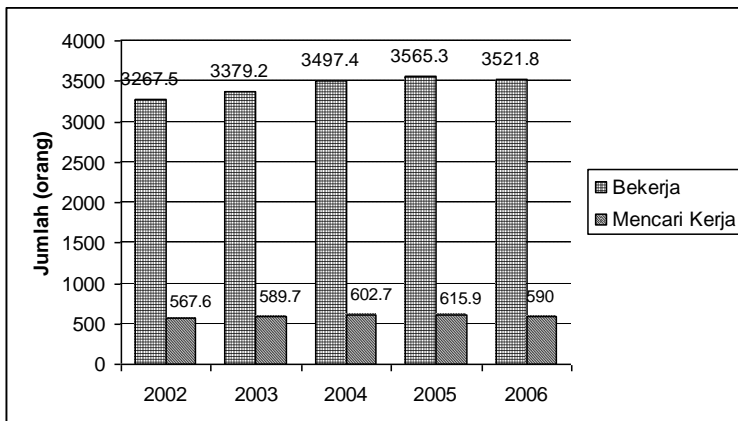
Aspek ketenagakerjaan meliputi kesempatan kerja, jumlah angkatan kerja, jumlah bukan angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja serta tingkat pengangguran terbuka. Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa (Tabel 16).

Tabel 16. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas sebagai Angkatan Kerja

Tahun	Angkatan Kerja (orang)		
	Bekerja	Mencari Kerja	Total
2002	3267.5	567.6	3835.1
2003	3379.2	589.7	3968.9
2004	3497.4	602.7	4100.1
2005	3565.3	615.9	4181.2
2006	3521.8	590	4121.8

Sumber: diolah dari data dari Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007

Berdasarkan data Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007, diperoleh bahwa jumlah penduduk yang bekerja di DKI Jakarta pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 terus meningkat. Persentase jumlah pencari kerja di Kota Jakarta terhadap jumlah pekerja, sebesar 17%, dan kondisi tersebut, relatif stabil dari tahun ke tahun dalam periode 2002-2006 (Gambar 18).



Gambar 18. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Yang Bukan Angkatan Kerja (sumber: Sumber: diolah dari data dari Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007)

Masyarakat yang bukan angkatan kerja, lebih banyak pada kegiatan mengurus rumah tangga. Dari data yang dirangkum dalam buku Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta, diperoleh bahwa angkatan kerja di DKI Jakarta (1990-2005) didominasi oleh penduduk laki-laki dan cenderung meningkat (Tabel 17).

Tabel 17. Persentase Angkatan Kerja penduduk Laki-laki 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin di DKI Jakarta, 1990-2005

Tahun	Laki-laki (%)
2001	80.82
2002	80.1
2004	75.59
2005	85.95
2006	84.08

Sumber: Diolah dari data Indikator kesejahteraan rakyat DKI Jakarta, 2001,2002, 2003, 2004, 2005

Sedangkan jumlah penduduk perempuan yang bekerja hanya mencakup sekitar 50% dari jumlah tenaga kerja laki-laki, dan cenderung menurun (Tabel 18)

Tabel 18. Persentase Angkatan Kerja penduduk Perempuan 10 tahun ke atas menurut jenis kelamin di DKI Jakarta, 1990-2005

Tahun	Perempuan (%)
2001	42.9
2002	42.34
2004	37.55
2005	40.41
2006	41.63

Sumber: Diolah dari data Indikator kesejahteraan rakyat DKI Jakarta, 2001,2002, 2003, 2004, 2005

* data dari Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007

Seperti terlihat pada Tabel 20, di mana jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta tahun 2007 mencapai 4,08 juta jiwa, yang terdiri dari 2,64 juta jiwa angkatan kerja laki-laki (64,72 persen) dan 1,44 juta jiwa angkatan kerja perempuan (35,28 persen). Secara umum, angkatan kerja di DKI Jakarta berpola rendah pada usia muda, kemudian mencapai

puncak pada usia 25-39 tahun menurun pada usia yang lebih tua (Tabel 19).

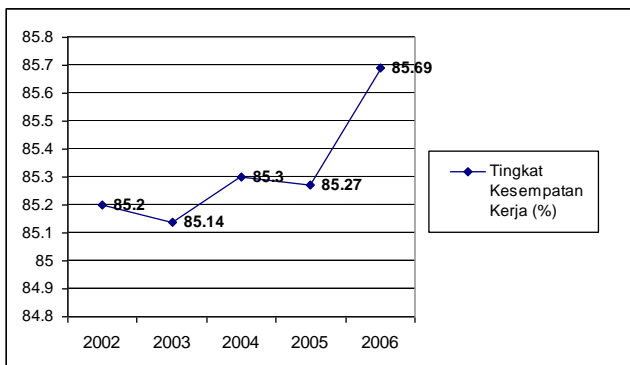
Tabel 19. Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2004 - 2007 (ribu orang)

Kelompok Umur	2004	2005	2006	2007		
				L	P	L+P
1. 15 - 19	269,4	218,2	219,8	116,8	115,2	232,0
2. 20 - 24	699,3	674,1	669,4	342,6	293,5	636,0
3. 25 - 29	679,2	775,0	744,7	490,3	289,2	779,5
4. 30 - 34	643,1	702,6	711,8	474,9	228,8	703,7
5. 35 - 39	530,7	571,2	551,3	373,4	170,4	543,8
6. 40 - 44	419,3	395,9	419,9	290,6	135,7	426,3
7. 45 - 49	325,4	323,3	319,8	207,8	87,9	295,7
8. 50 - 54	254,6	231,8	225,6	145,7	66,3	212,0
9. 55 - 59	134,0	138,7	125,0	100,5	27,8	128,3
10. 60 +	144,9	150,6	134,4	101,2	26,6	127,8
Penduduk AK	4.100,1	4.181,2	4.121,8	2.643,7	1.441,3	4.085,0

Sumber : Sakernas, BPS Provinsi DKI Jakarta

Tingkat kesempatan kerja periode tahun 2002-2006 mengalami peningkatan dari tahun-ke tahun meskipun tidak signifikan (Gambar 19). Demikian pula dengan penduduk kota Jakarta yang berusia 15 tahun, yang merupakan angkatan kerja yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun (2002-2006).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara



Gambar 19. Tingkat Kesempatan Kerja di Kota Jakarta (2002-2006) (Sumber: diolah dari data dari Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007)

tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti.

Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Sementara itu, penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Tingkat partisipasi masyarakat angkatan kerja laki-laki di DKI Jakarta, lebih banyak dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan. Meskipun partisipasi angkatan kerja laki-laki di semua tingkatan pendidikan (2001-2007) cenderung menurun (Tabel 20).

Tabel 20. Tingkat partisipasi angkatan kerja Laki-laki menurut tingkat pendidikan (2001-2007)

Tingkat Pendidikan	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
SD Kebawah	84.4	79.03	81.03	82.16	77.87	85.51	81.71
SLTP	69.8	67.64	70.77	71.84	70.68	74,08	73.53
SLTA	86.95	87.33	86.62	88.55	82.42	91.04	88.72
D1 ke atas	83.88	91.29	92.39	91.74	85.61	92.69	91.66

Sumber: Diolah dari data Perkembangan Angkatan Kerja DKI Jakarta, 2001-2007

Sedangkan angkatan kerja perempuan, meskipun lebih sedikit dibandingkan angkatan kerja laki-laki, namun di dalam semua tingkatan pendidikan cenderung meningkat (Tabel 21).

Tabel 21. Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan menurut tingkat pendidikan (2001-2007)

Tingkat Pendidikan	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
SD Kebawah	40.28	36.89	34.19	36.19	41.04	34.15	36.48
SLTP	34.06	29.2	27.78	29.33	34.4	28.48	29.87
SLTA	49.79	46.08	43.26	45.89	44.51	47.39	46.02
D1 ke atas	73.24	71.75	70.65	70.31	61.83	71.14	70.55

Sumber: Diolah dari data Perkembangan Angkatan Kerja DKI Jakarta, 2001-2007

Namun, dari keseluruhan, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja laki-laki di semua tingkatan pendidikan lebih banyak dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan di semua tingkatan pendidikan. Di mana tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki menurut semua

tingkat pendidikan rata-rata di atas 67%, dan pendidikan angkatan kerja tertinggi laki-laki D1 ke atas. Angkatan kerja perempuan di Kota Jakarta lebih banyak berpendidikan D1 ke atas (60-80%), namun pendidikan tenaga kerja perempuan rata-rata masih lebih rendah dari pendidikan tenaga kerja laki-laki. Rata-rata tenaga kerja perempuan berpendidikan SD, SLTP dan SLTA. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 22. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di DKI Jakarta

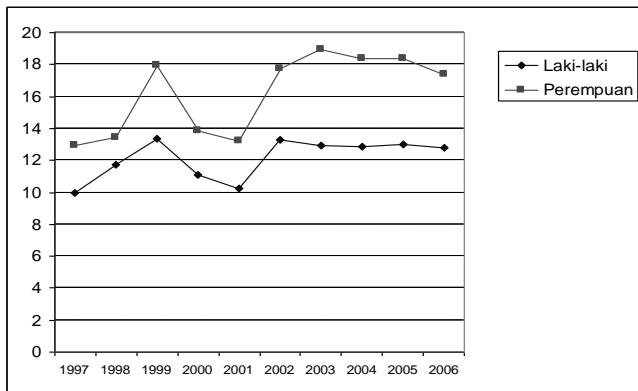
Tahun	Laki-laki	Perempuan
2001	13.27	18.33
2002	13.31	17.73
2003	12.9	18.95
2004	12.9	18.4
2005	13	18.37
2006	12.79	17.37
2007	12.82	14.08

Sumber: diolah dari data Perkembangan Angkatan Kerja DKI Jakarta, 2001-2007

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta pada Agustus 2007 mencapai 12,57 persen, mengalami penurunan dibandingkan keadaan pada Agustus 2006 (14,31 persen). Situasi ketenagakerjaan pada bulan Agustus 2007 ditandai dengan meningkatnya jumlah pekerja di beberapa sektor. Sektor yang mengalami peningkatan dengan jumlah tertinggi dibandingkan dengan keadaan Agustus 2006 adalah sektor industri pengolahan; angkutan, komunikasi dan pergudangan; serta keuangan dan jasa perusahaan. Selanjutnya perkembangan tingkat pengangguran dapat digambarkan dengan menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (*TPT/Open Unemployment Rate*), yaitu perbandingan jumlah orang yang menganggur terhadap total angkatan kerja. Pada gambar 19 terlihat tingkat pengangguran terbuka perempuan masih lebih tinggi dari tingkat pengangguran laki-laki di Kota Jakarta. Jumlah penganggur

pada Agustus 2007 mengalami penurunan sebesar 38 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2006 yaitu dari 590 ribu orang pada Agustus 2006 menjadi 552 ribu orang pada Agustus 2007.

Jika dilihat data pada tahun 2001-2007, tingkat pengangguran terbuka laki-laki masih lebih rendah dan stabil dari tahun ke tahun (2001-2007) dari pada tenaga kerja perempuan. Namun, pada tahun 2007, tingkat pengangguran perempuan menurun drastis dari 17,37% tahun 2006 turun menjadi 13,31 pada tahun 2007, hampir menyamai angka tingkat pengangguran laki-laki 12,13% pada tahun 2007 (Gambar 20).



Gambar 20. Tingkat Pengangguran Terbuka Perempuan dan Laki-laki di DKI Jakarta tahun 1997-2006 (Sumber: BPS 2006)

4.1.5. Kondisi Tata Ruang Kota Jakarta

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (Direktorat Jenderal Penataan Ruang 2002), bahwa kawasan perkotaan dibedakan berdasarkan status pemerintahan dibedakan, yaitu:

- a. Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota; yang terdiri dari ibukota Kabupaten, Kawasan Perkotaan yang

sesuai kriteria, termasuk Kawasan Perkotaan Baru (yaitu kawasan yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan);

- b. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah Otonom yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.

Kota Jakarta merupakan kawasan kerkotaan dengan status pemerintahan kawasan perkotaannya merupakan bagian dari dua atau lebih daerah otonom yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan. Kawasan perkotaan Kota Jakarta termasuk dalam kriteria kawasan perkotaan metropolitan. Di mana, kriteria kawasan perkotaan metropolitan, sebagai berikut:

- a. Kawasan-kawasan Perkotaan yang terdapat di dua atau lebih daerah otonom yang saling berbatasan;
- b. Kawasan Perkotaan yang terdiri atas satu kota inti berstatus otonom dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk suatu sistem fungsional;
- c. Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan melebihi 1.000.000 jiwa.

Yang dimaksud dengan *wujud struktural_pemanfaatan ruang* adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2002), bahwa Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan berfungsi sebagai berikut:

- a. Menciptakan keserasian pembangunan kota inti dengan Kawasan Perkotaan sekitar di dalam wilayah pengaruhnya sebagai satu kesatuan pengembangan Kawasan Perkotaan;
- b. Menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dengan strategi perkotaan nasional dalam jangka panjang;
- c. Menjaga keserasian perkembangan kota dengan wilayah pengembangannya.

Arahan struktur pemanfaatan ruang Kota Jakarta berdasarkan RTRW 2010 dan berdasarkan komponen utama pembentuk ruang meliputi kawasan hijau, kawasan permukiman, kawasan ekonomi prospektif, sistem pusat kegiatan, dan sistem prasarana sebagai berikut:

Kawasan Hijau

Kawasan hijau adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari kawasan hijau lindung dan hijau binaan. Kawasan hijau lindung meliputi hutan lindung, cagar alam, dan hutan bakau di pantai lama bagian barat Jakarta, serta Taman Nasional Laut di Kepulauan Seribu. Kawasan hijau lindung dan/atau hijau binaan tidak dapat diubah fungsi dan peruntukannya. Kawasan hijau binaan meliputi: (i) RTH berbentuk areal dengan fungsi sebagai fasilitas umum; (ii) RTH berbentuk jalur untuk fungsi pengaman, peneduh, penyangga, dan atau keindahan lingkungan; (iii) RTH berbentuk hijau budidaya pertanian; (iv) Prosentase luas keseluruhan kawasan hijau lindung dan hijau binaan sampai tahun 2010 ditetapkan sebanyak 13,94 % dari luas wilayah Kota Jakarta.

Kawasan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur; Kawasan permukiman terdiri atas kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi dan sedang, dan kawasan permukiman dengan kepadatan rendah. Pengembangan permukiman secara bertahap diarahkan untuk mencapai norma 1 (satu) unit rumah yang layak untuk tiap keluarga. Setiap kawasan permukiman secara bertahap dilengkapi dengan sarana lingkungan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan standar fasilitas umum/fasilitas sosial. Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dimaksud, meliputi: (i) fasilitas Pendidikan; (ii) fasilitas Kesehatan; (iii) fasilitas Peribadatan; (iv) fasilitas Olah; (v) olahraga/Kesenian/Rekreasi; (vi) fasilitas Pelayanan Pemerintah; (vii) fasilitas Bina Sosial; (viii) fasilitas Perbelanjaan/Niaga; (ix) fasilitas Transportasi; Bangunan campuran pada kawasan permukiman terdiri dari campuran antara perumahan dengan jasa, perdagangan, industri kecil dan atau industri rumah tangga secara terbatas beserta fasilitasnya.

Kawasan Ekonomi Prospektif

Kawasan ekonomi prospektif terdiri atas kawasan dengan pemanfaatan perkantoran, perdagangan dan jasa, kawasan campuran, dan kawasan industri dan pergudangan serta kawasan pelabuhan. Pengembangan kawasan ekonomi prospektif, bertujuan untuk: (i) meningkatkan kemampuan kota Jakarta dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi ekonomi; (ii) memantapkan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk mengakomodasikan dampak globalisasi ekonomi dan mendorong Kota Jakarta sebagai kota jasa; (iii) meningkatkan kapasitas tampung kawasan ekonomi prospektif terhadap kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa serta campuran perumahan secara vertikal sekaligus untuk meningkatkan kualitas ruang kota; (iv) meningkatkan alokasi ruang bagi sektor informal dan golongan usaha skala kecil secara terintegrasi dengan pengembangan sektor formal besar dari berbagai jenis aktivitas perekonomian; (v) mengembangkan dan menata kawasan ekonomi prospektif di kelima wilayah kota menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun pemodal asing, yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai. Pengembangan kawasan ekonomi prospektif dilakukan melalui:

- a. Mengembangkan kegiatan perdagangan/jasa dan campuran berintensitas tinggi di WP Tengah Pusat untuk skala pelayanan nasional dan internasional, di kawasan Sentra Primer Baru Barat, Sentra Primer Baru Timur, Bandar Baru Kemayoran, dan bagian tengah kawasan Pantura;
- b. Mengembangkan kawasan industri yang dibatasi hanya untuk jenis industri yang hemat penggunaan lahan dan air, tidak berpolusi dan menggunakan teknologi tinggi;
- c. Mengembangkan industri perakitan yang diarahkan pada daerah industri yang memiliki akses langsung ke jalan arteri di kawasan sekitar Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Sistem Pusat Kegiatan

Sistem pusat kegiatan ditetapkan untuk menunjang Jakarta sebagai kota jasa dan pemeratakan pusat kegiatan pemerintahan, kegiatan sosial, ekonomi, budaya, serta kegiatan pelayanan. Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dibedakan berdasarkan kegiatan kawasan sebagai pembentuk struktur ruang dan kawasan

fungsi khusus sebagai pusat pemerintahan, pusat perwakilan negara asing, pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pusat Kegiatan Utama adalah sistem Pusat Kegiatan Utama menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang sebagaimana ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sentra Primer Baru Timur sebagai pusat pemerintahan kotamadya, perkantoran, perdagangan dan jasa;
- b. Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat pemerintahan kotamadya, perkantoran, perdagangan dan jasa;
- c. Pusat Niaga Terpadu Pantura sebagai pusat niaga baru di bidang perdagangan, jasa dan lembaga keuangan;
- d. Sentra Primer Glodok sebagai pusat perdagangan elektronik;
- e. Sentra Primer Tanah Abang sebagai pusat perdagangan tekstil;
- f. Pusat Niaga Terpadu Kuningan, Sudirman, dan Casablanca sebagai pusat perkantoran dan jasa keuangan;
- g. Pusat Niaga Terpadu Mangga Dua sebagai pusat perdagangan pakaian jadi;
- h. Pusat Niaga Terpadu Bandar Baru Kemayoran sebagai pusat eksibisi dan informasi bisnis.

Sistem Pusat Kegiatan Utama menurut fungsi khusus ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pusat Pemerintahan Nasional dan Propinsi di kawasan Medan Merdeka;
- b. Pusat Perwakilan Negara Asing di kawasan Kuningan dan Jalan MH. Thamrin;
- c. Pusat Rekreasi: Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, Kepulauan Seribu, Taman Margasatwa Ragunan, dan Bumi Perkemahan Cibubur;
- d. Pusat Olahraga di Senayan;
- e. Pusat Kesehatan di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto;
- f. Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki;
- g. Pusat Distribusi Barang di Tanjung Priok, Distribusi Bahan Bakar Minyak di Plumpang, Pasar Induk Bahan Pangan di Kramat Jati, Cipinang, dan Rawa Buaya.

Pusat Kegiatan Penunjang adalah sistem Pusat Kegiatan Penunjang menurut fungsi kawasan sebagai pembentuk struktur ruang

dan menurut fungsi khusus ditetapkan pada Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Kotamadya.

Kondisi Pola Pemanfaatan Ruang Kota Jakarta

Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan.

Rencana pola pemanfaatan tata ruang wilayah DKI Jakarta diwujudkan berdasarkan persebaran penduduk, arahan pengembangan komponen utama pembentuk ruang, dan arahan intensitas ruang. Komponen utama pembentuk ruang meliputi kawasan hijau, kawasan pemukiman, kawasan ekonomi, dan sistem prasarana. Sedangkan arahan intensitas ruang dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan maupun prasarana.

Pola Pemanfaatan Ruang di Kota Jakarta dalam RTRW 2010, diatur ke dalam 5 wilayah, yaitu: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pengaturan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan potensi wilayah masing-masing.

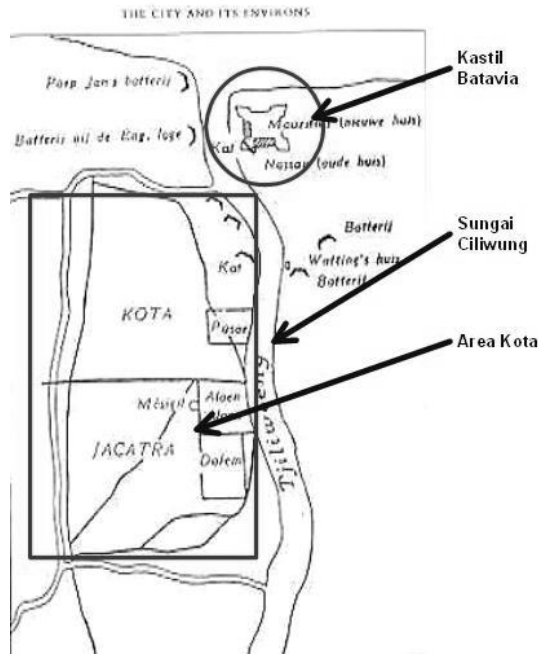
Pemanfaatan lahan di kota Jakarta sangat didominasi oleh perumahan, kemudian industri, perkatoran dan pemanfaatan lain. Taman hanya memanfaatkan rata-rata sekitar 1,5% dari total seluruh pemanfaatan lahan sebagai bangunan. Lahan di Kota Jakarta dimanfaatkan sebagai perumahan, industri, perkatoran dan gudang, taman dan pemanfaatan lain. Perumahan memanfaatkan lahan terbesar di kota Jakarta, sehingga terjadi kepadatan yang tinggi, yaitu 13,5 ribu per km². Akibatnya, kota Jakarta merupakan propinsi terpadat penduduk di Indonesia (Jakarta Dalam Angka 2007).

Tabel 23. Pemanfaatan Lahan di Kota Jakarta (Ha)

Tahun	Perumahan	Industri	Perkatoran & Gudang	Taman	Lainnya
2001	43,475.09	3,228.21	7,898.54	1,270.11	10,280.02
2002	44,414.00	3,764.98	7,174.63	1,009.56	9,788.81
2003	44,052.27	4,259.60	7,342.88	800.91	9,696.23
2004	43,788.57	4,417.87	7,445.85	914.69	9,584.40
2005	44,196.11	3,559.00	8,262.38	1,084.89	9,049.62
2006	42,440.61	3,579.67	7,460.07	1,007.49	11,664.16

Sumber: Diolah dari Jakarta Dalam Angka 2006 & 2007

Kota Jakarta didominasi oleh pemukiman, sehingga lahan perumahan erupakan terluas di Kota Jakarta. Pemanfaatan lainnya adalah lahan yang mendominasi urutan kedua dan kondisinya cenderung terjadi peningkatan luas lahan. Kemudian diikuti oleh pemanfaatan perkantoran dan gudang. Taman di kota Jakarta yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau memiliki luas lahan paling sempit (Tabel 22). Awal mula terbentuknya kota Jakarta, adalah berdirinya sebuah bangunan kastil milik pemerintahan Belanda ketika itu, yang dikenal sebagai Kastil Batavia. Bangunan ini dirancang oleh arsitek ternama

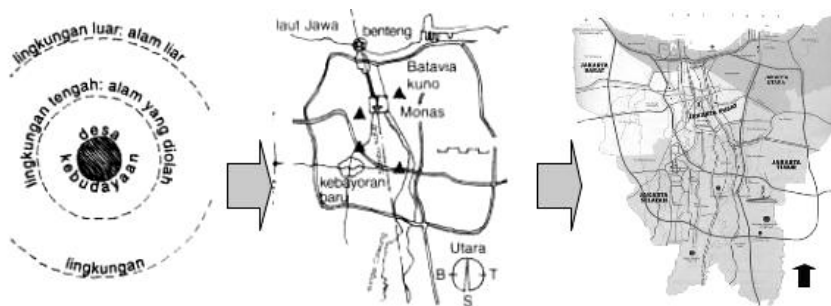


Gambar 21. Posisi Kastil Batavia dan zona kota pada tahun 1619
(Sumber: dimodifikasi dari peta dasar Batavia 1619 yang diambil dari
www.maclester.edu)

berkebangsaan Belanda, Simon Stevin pada tahun 1619. Bentuk bangunan dirancang sesuai dengan model bangunan yang ada di Amsterdam. Bangunan yang berbentuk benteng dibangun dengan dikelilingi tembok dan gerbang. Ukuran dari kota dalam tembok ini hanya 1 kilometer kali 1,5 kilometer (Van De Brug 2007:49). Seperti model kota-kota moderen awal Acropolis (Yunani) yang dibangun berbentuk sebuah benteng (citadel). Kota dibangun sebagai upaya

melindungi dan mempertahankan kehidupan manusia dari serangan musuh (Gambar 21). Demikian pula kota Batavia, hanya dibangun untuk mempertahankan para penghuni kastil. Kota baru disahkan pada 1620, untuk kemudian dikukuhkanlah sebuah pemerintahan (*Stad*) Batavia pada 4 Maret 1621. Dan, sejak saat itu pula, Jayakarta disebut Batavia selama tiga ratus tahun lebih (1619-1942). Menurut Lambert Giebels dalam Frick & Mulyani (2006:125) bahwa penghuni kota di Indonesia kebanyakan masih terlahir di pedesaan dan bukan di perkotaan, dan urbanisasi menjadi masalah penting bagi kota-kota di Indonesia. Akibatnya, penghuni kota kebanyakan adalah pendatang dari desa, sehingga pengertian kota sangat dipengaruhi oleh pengertian pedesaan, demikian pula kota Jakarta.

Secara makro perkembangan pola kota Jakarta adalah bentuk lingkaran (Gambar 22). Sedangkan pola tata kota secara mikro, kota Jakarta menggunakan konsep pola segi empat. Pola segi empat ini mendominasi zona-zona permukiman kota di lima wilayah kota Jakarta. Zona-zona permukiman cenderung tidak lagi terpusat pada satu wilayah, tetapi kini telah menyebar ke seluruh wilayah kota dan lebih mendekati pada zona-zona kegiatan ekonomi (industri dan perdagangan) kota.



Gambar 22. Konsep pola tata kota lingkaran menjadi dasar pola kota Jakarta secara makro

Semenjak dideklarasikannya piagam Athena pada tahun 1933, yang sangat dipengaruhi oleh dalil-dalil arsitek Le Corbusier, di mana ruang-ruang kota dipisahkan secara ketat berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi hunian, pekerjaan, perbelanjaan, dan jasa. Maka, seluruh kota di seluruh dunia melakukan pembagian ruang-ruang kota berdasarkan fungsinya, termasuk kota Jakarta. Ini tergambar dalam setiap rencana tata ruang wilayah kota Jakarta. Kota Jakarta membagi pusat kegiatan

dalam lima wilayah kota, yaitu: (1) Jakarta Pusat; (2) Jakarta Selatan; (3) Jakarta Barat; (4) Jakarta Utara; dan (5) Jakarta Timur. Di mana masing-masing wilayah tersebut membagi wilayahnya sesuai dengan zona-zona kegiatan yang masih didasari oleh konsep piagam Athena.

Pada tahun 1985, Kota Jakarta dibagi dalam empat zona pemanfaatan ruang, yaitu: (1) hunian; (2) industrial estate; (3) bangunan campuran; dan (4) bangunan publik (umum). Zona industrial estate ditempatkan di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur, sedangkan zona hunian sebagai besar berada di Jakarta selatan. Zona bangunan publik dan bangunan campuran di kawasan Jakarta Pusat (Gambar 23).

Saat ini, tahun 2007 pola tata ruang kota Jakarta di dominasi oleh lahan permukiman dan perkantoran dan lahan peruntukkan lainnya seperti pada. Pola pemanfaatan ruang (pola tata kota) Jakarta cenderung terus membentuk pola lingkaran bagi pola makro dan pola segi empat pada pola mikro, yang semakin meluas sehingga menjangkau kota-kota yang ada di wilayah kota Jakarta (Gambar 24). Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi telah mendorong pengembangan wilayah perkotaan yang semakin melebar ke daerah pinggiran kota/daerah penyangga di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Jika digabungkan, pertumbuhan rata-rata penduduk DKI Jakarta dan Bodetabek (Jabodetabek) antara tahun 1980 dan 2000 adalah 2,9% per tahun (3,6% per tahun selama kurun waktu 1980-1990 dan 2,1% selama 1990-2000).

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk DKI Jakarta yang 0,9% (1980-1990) dan 0,7% (1990-2000) per tahun. Pola tata ruang kota seperti terlihat pada gambar 24 yang diambil pada bulan September 2007 melalui www.googleearth.com. Pola pemanfaatan lahan yang digunakan saat ini, masih dipengaruhi oleh pola-pola piagam Athena, di mana pengelompokkan zona sesuai fungsi (industri, permukiman dan bangunan umum) masih terpusat pada lokasi-lokasi tertentu dan tidak mudah untuk dipindahkan. Seperti lokasi industri di kawasan utara Jakarta (Tanjung Priok), kawasan timur serta kawasan timur Jakarta. Serta zona bangunan umum yang hingga saat ini masih terpusat di pusat kota Jakarta. Kondisi ini, jika dihubungkan jumlah penduduk yang semakin banyak dan lokasi-lokasi zona yang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang ada saat ini, akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan transportasi dan jarak tempuh dari tempat tinggal ke tempat kerja di pusat-pusat kota maupun di kawasan industri di wilayah Jabodetabek. *The study on integrated transport master*

plan for Jabodetabek (SITRAMP) oleh JICA tahun 2004 yang dikutip dalam ADB (2006), mengindikasikan bahwa terjadi pergerakan lebih dari 1,3 juta kendaraan per hari dari wilayah Bodetabek ke DKI Jakarta dan sebaliknya (Tabel 24).

Tabel 24. Volume pergerakan komuter/ulang-alik di Jabodetabek

Arah pergerakan	Volume pergerakan (kendaraan / hari)	Volume pergerakan (orang / hari)
DKI Jakarta-Tangerang	412.543	1.221.079
DKI Jakarta-Bekasi	499.198	1.503.654
DKI Jakarta-Bogor/Depok	424.219	1.369.626

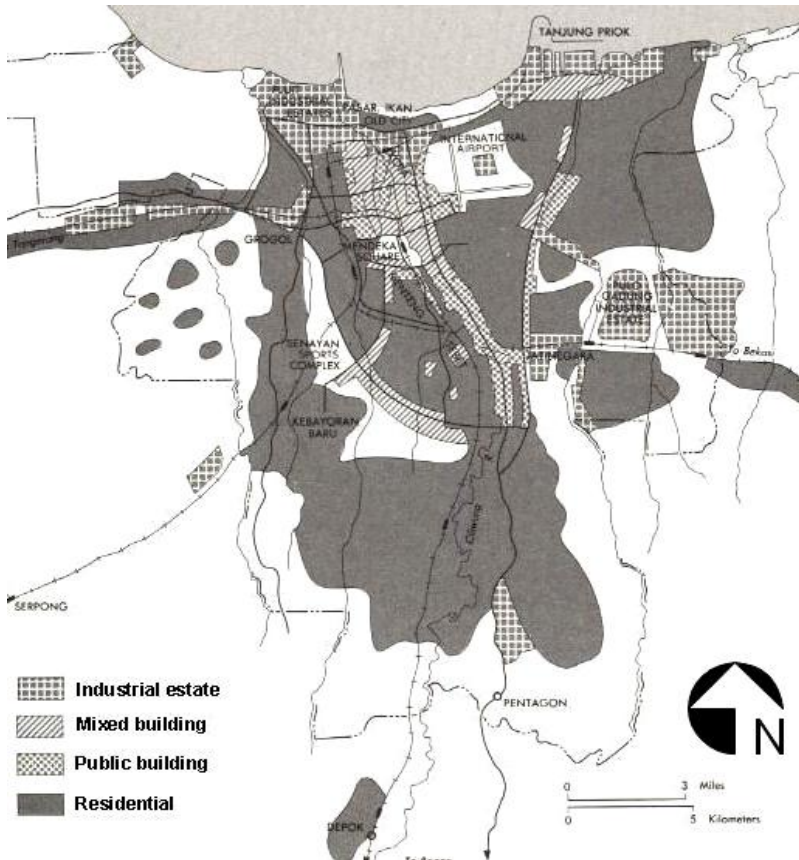
Sumber: diadopsi dari ADB (2006) hal.xiii

4.1.6. Kondisi Pemanfaatan Lahan Permukiman di Kota Jakarta

Hakekat dari perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang serta mempunyai peran sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan nilai kehidupan, penyiapan generasi muda, dan bentuk manifestasi jatidiri. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman merupakan kawasan perumahan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang tertentu, yang dilengkapi dengan sistem prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja terbatas dan dengan penataan ruang yang terencana dan teratur sehingga memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Dalam RTRW Jakarta tahun 2010, alokasi lahan untuk permukiman seluas 37,21% dari luas Jakarta atau 5.477,68 ha. Menurut analisis Bianpoen (2006:5) bahwa sejak tahun 2001 hingga kini telah

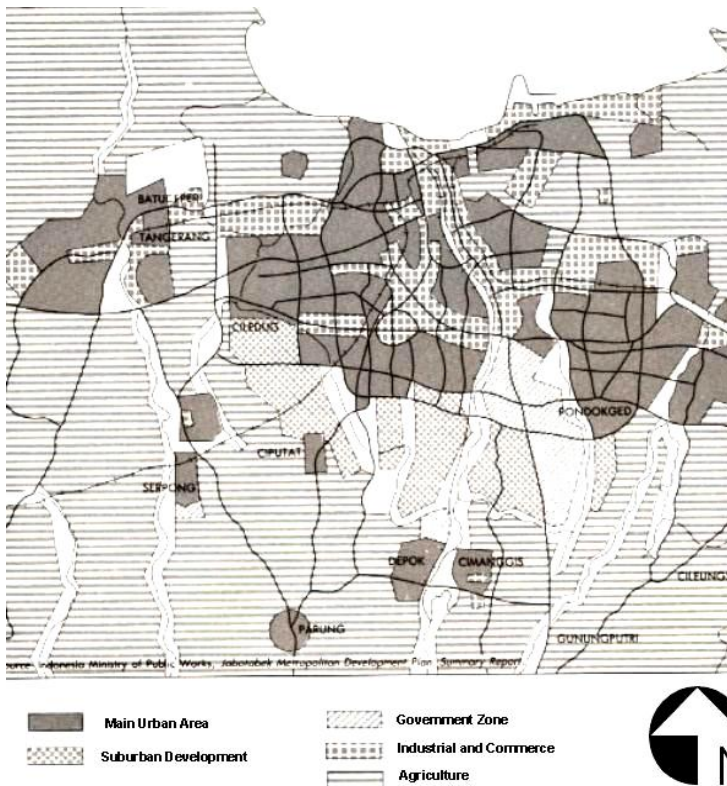
terjadi pengurangan lahan pemukiman sebesar 17.997,41 ha. Apabila diasumsikan yang dibongkar adalah kawasan pemukiman kumuh yang memiliki kepadatan rata-rata 300 orang per hektar, maka yang tergusur sekitar 5,4 juta orang dari masyarakat yang memiliki ekonomi lemah atau masyarakat miskin.



Gambar 23. Pembagian zona peruntukkan lahan kota Jakarta pada tahun 1985 (Sumber: dimodifikasi dari peta Jakarta Urban www.maclester.edu)

Permukiman, kegiatan ekonomi, prasarana transportasi, dan kawasan hijau adalah komponen penting dalam tata ruang yang memberikan pengaruh terhadap kondisi udara perkotaan. Pembangunan permukiman di wilayah Bodetabek umumnya tidak diikuti dengan pembangunan sistem transportasi sehingga kendaraan bermotor pribadi menjadi pilihan moda transportasi yang utama bagi

mereka yang tinggal di Bodetabek dan bekerja di DKI Jakarta. Menurut Supriatna yang dikutip dalam ADB (2006) bahwa perkembangan kota yang pesat telah mengurangi kawasan hijau (ruang terbuka hijau/RTH) di DKI Jakarta; terjadi penurunan RTH dari 70% pada tahun 1970 menjadi sekitar 10% pada waktu sekarang. Sebagian RTH telah beralih fungsi menjadi hotel, mal, stasiun pengisian bahan bakar, dan areal pedagang kaki lima (ADB 2006). Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sasaran RTH pada tahun 2010 adalah 13,94% kali luas wilayah DKI Jakarta atau 9.544 ha. Saat ini luas RTH mencapai 9,67% atau 6.623 ha; jadi masih dibutuhkan 3.354 ha untuk mencapai sasaran tersebut.



Gambar 24. Pembagian zona peruntukkan lahan kota Jakarta pada tahun 1993 (Sumber: dimodifikasi dari peta Jakarta Urban www.maclester.edu)

Kawasan Ekonomi Prospektif

Kawasan ekonomi prospektif terdiri atas kawasan dengan pemanfaatan perkantoran, perdagangan dan jasa, kawasan campuran, dan kawasan industri dan pergudangan serta kawasan pelabuhan. Pengembangan kawasan ekonomi prospektif, bertujuan untuk: (i) meningkatkan kemampuan kota Jakarta dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi ekonomi; (ii) memantapkan kawasan-kawasan yang diprioritaskan untuk mengakomodasikan dampak globalisasi ekonomi dan mendorong Kota Jakarta sebagai kota jasa; (iii) meningkatkan kapasitas tampung kawasan ekonomi prospektif terhadap kegiatan-kegiatan perdagangan dan jasa serta campuran perumahan secara vertikal sekaligus untuk meningkatkan kualitas ruang kota; (iv) meningkatkan alokasi ruang bagi sektor informal dan golongan usaha skala kecil secara terintegrasi dengan pengembangan sektor formal besar dari berbagai jenis aktivitas perekonomian; (v) mengembangkan dan menata kawasan ekonomi prospektif di kelima wilayah kota menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi



Gambar 25. Pola tata kota Jakarta yang didominasi oleh lahan pemukiman dan pemanfaatan lain (Sumber: www.googleearth.com di unduh pada September 2007)

penanam modal dalam negeri maupun pemodal asing, yang didukung dengan prasarana dan sarana yang memadai.

Dari pemanfaatan lahan dalam RTRW 2010 memperlihatkan bahwa lahan untuk Kawasan Ekonomi Progresif seluas 50% dari luas total Kota Jakarta.

4.1.6. Kondisi Perlindungan Lingkungan

Kota Jakarta dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi, keterbatasan lahan dan laju pembangunan yang tinggi, menyebabkan menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota yang juga memberi dampak serius pada kesehatan penduduk dan terdegradasinya lingkungan dan sumber daya alam. Berdasarkan data PROPEDA 2002-2007, di kemukakan, bahwa pencemaran lingkungan yang menonjol di kota Jakarta, diantaranya:

- a. Pencemaran air (sungai, waduk/situ, pantai, teluk, laut dan air tanah) yang disebabkan oleh pembuangan limbah domestik dan limbah industri.
- b. Pencemaran udara yang disebabkan antara lain oleh sektor industri, transportasi dan aktivitas manusia sehari-hari.
- c. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang belum optimal. Kondisi pengelolaan persampahan DKI Jakarta cukup kompleks mengingat tingginya timbulan sampah Jakarta, yaitu 26.945m³/hari dan prediksi kenaikan 5% pertahun, belum optimalnya penerapan 3R di sumber, masih tercampurnya sampah dengan limbah B3 rumah tangga, tingkat pengangkutan yang baru mencapai 91,51%, dan kurangnya fasilitas pengolahan sampah Jakarta. Saat ini Jakarta hanya mempunyai 1 (satu) TPA, yaitu TPA Bantargebang yang letaknya di wilayah Bekasi, dan 1 (satu) PDUK (Pusat Daur Ulang dan Kompos) milik swasta. Kondisi ini sangat mempengaruhi kelancaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta.

Disadari oleh pemerintah DKI Jakarta, bahwa pembangunan ekonomi di provinsi ini telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di wilayah perkotaan Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pemantauan kualitas lingkungan yang meliputi: (i) pemantauan kualitas air tanah dangkal; (ii) pemantauan kualitas air

sungai; (iii) pemantauan kualitas udara; (iv) pemantauan kualitas Teluk Jakarta (kualitas perairan Teluk Jakarta dan Muara Teluk Jakarta); (v) pemantauan kualitas Situ/Waduk.

Dan dari hasil pemantauan telah terbukti bahwa kualitas lingkungan telah melampaui batas standar baku mutu (Gambar 25). Hal ini mendorong pemerintah melakukan beberapa program pengendalian pencemaran lingkungan, seperti: (i) Program Kali Bersih (PROKASIH); (ii) Program Udara Bersih (PRODASIH); (iii) Program Laut Lestasi; (iv) Program Pengendalian dan Pencegahan Dampak Lingkungan; dan (v) Program Kendali Limbah Berbahaya dan Beracun (B-3).

Kualitas Udara Kota Jakarta

Kualitas udara kota Jakarta saat ini berada pada urutan ke tiga terburuk di dunia, setelah Meksiko dan Panama. Di mana komponen terbesar yang menyumbangkan polusi udara adalah asap dari kendaraan bermotor, yaitu 80% sedangkan 20% lainnya berasal dari industri (Tempo Interaktif 25 Juli 2005).

Ini berarti mutu ambien udara telah tercemar oleh zat, energi, dan/atau komponen lain akibat kegiatan manusia, tercemar dan mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Menurut Zahra *et al* (2006), dalam laporannya tentang “Analisis Pencemaran Udara di DKI Jakarta dengan Pemodelan Kualitas Udara” bahwa tahun 2004 penduduk Jakarta disinyalir hanya memiliki waktu 18 hari dalam setahun untuk menikmati udara yang berkualitas baik. Dan angka kerugian yang dibebankan pada ekonomi kota sebagai biaya kesehatan pencemaran udara di DKI Jakarta tahun 2002 diperkirakan sebesar Rp 3,8 triliun per tahun.

Kondisi ini didukung oleh penelitian BPLHD Jakarta yang dikutip dalam laporan Antara News pada 3 Januari 2007, yaitu: pada sepanjang tahun 2002 jumlah hari dengan kualitas udara berkategori baik adalah 21 hari, tahun 2003 menjadi 25 hari, 2004 menjadi 53 hari, tahun 2005 turun lagi menjadi 28 hari, dan pada tahun 2006 tercatat 37 hari. Menurut laporan BPLHD Jakarta bahwa penyebab utama adalah emisi gas kendaraan bermotor (*brown smog*), yaitu sebesar 79%. Kondisi ini didukung oleh hasil inventarisasi emisi yang dilaporkan Zahra *et al* (2006) bahwa hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan di 25 lokasi di DKI Jakarta tahun 2006 menunjukkan hasil yang beragam.

Konsentrasi TSP berkisar antara 74,07-416,26 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dengan rata-rata 220,43 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Nilai rata-rata ini hampir mendekati nilai ambang batas (230 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Zahra *et al* (2006) mengemukakan bahwa hasil penelitian ini serupa dengan pengukuran tahun 2003 pada lima lokasi di DKI Jakarta yang berkisar antara 20,34-509 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, dengan rata-rata 224,08 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Untuk polutan Pb, hasil penelitian berkisar antara 0,00 -3,88 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dengan rata-rata 1,08 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Nilai rata-rata ini masih dibawah nilai ambang batas (92,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$). Hasil penelitian ini lebih kecil dari pengukuran yang dilakukan tahun 2005 pada lima lokasi di DKI Jakarta yang berkisar antara 35-250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dengan rata-rata 140 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Zahra *et al* (2006) mengemukakan bahwa dari lima wilayah di DKI Jakarta, belum ada satu pun wilayah yang benar-benar bebas dari Pb. Untuk parameter NO_x, wilayah yang paling tinggi terdeteksi adanya polutan NO_x adalah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Sedangkan wilayah lain, memiliki kisaran konsentrasi NO_x yang tidak jauh beda dibanding kedua wilayah tersebut. Kelima wilayah DKI Jakarta dapat disimpulkan masih dalam batas aman untuk parameter NO_x. Apalagi, provinsi DKI Jakarta sangat tergantung pada sumber energi minyak bumi. Di mana, pada tahun 2003 konsumsi minyak bumi DKI Jakarta, yang terdiri dari bensin, minyak solar, dan minyak tanah mencapai sekitar 68% dari total konsumsi energi (BPS DKI Jakarta, 2004).

Dampak kesehatan akibat pencemaran udara adalah yang dominan, yaitu 90% dari total kerusakan (Shechter *et al*, 1989). Di DKI Jakarta, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) merupakan penyakit terbanyak yang diderita oleh anak-anak. Profil Kesehatan DKI Jakarta pada tahun 2004 menunjukkan sebanyak 46% dari kasus-kasus penyakit adalah penyakit gangguan pernafasan (ISPA 43%, iritasi mata 1,7% dan asma 1,4%) yang kemungkinan terkait dengan pencemaran udara. Sementara itu, walaupun tidak dapat dipastikan penyebabnya, ada kemungkinan sekitar 5% dari 32% kematian (karena penyakit jantung dan paru-paru 28,3% dan pneumonia 3,7%) atau 3% dari seluruh kematian juga dipengaruhi oleh salah satunya kualitas udara yang buruk (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2005). Beberapa penelitian dampak kesehatan yang telah dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya adalah:

- a. Studi oleh Center for Diseases Control (CDC), United States Asia Environmental
- b. Partnership (USAEP), dan Haryanto pada tahun 2001 - 2005 tentang kadar timbal (Pb) dalam darah siswa-siswa Sekolah

Dasar (SD) di DKI Jakarta: Pada tahun 2001, kadar rata-rata Pb-darah 396 siswa SD adalah 8,6 mikrogram (μg)/desiliter dan 35% dari siswa-siswa tersebut memiliki kadar lebih dari 10 μg /dl. Sedangkan pada tahun 2005, dengan menggunakan metodologi yang sama, ditemukan kadar rata-rata Pb-darah 4,2 μg /dl dan hanya 1.3% yang memiliki kadar lebih dari 10 μg /dl. Temuan ini menunjukkan implikasi positif dan signifikan dari penghapusan bensin bertimbal di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

- c. Studi oleh Universitas Indonesia, USAEP, dan Haryanto pada tahun 2005 tentang risiko kesehatan partikel halus berukuran hingga 2,5 mikrometer (PM_{2,5}) dan CO pada populasi di DKI Jakarta dan sekitarnya: Pemantauan konsentrasi PM_{2,5} dan CO dilakukan dengan menggunakan alat *personal exposure monitoring* pada setiap reseptor responden ketika melakukan berbagai kegiatan di dalam ataupun di luar ruangan selama 3 x 24 jam.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa mereka yang melakukan aktivitas di luar ruang berdekatan dengan sumber pencemaran (di jalan) memiliki risiko kesehatan yang tinggi, baik yang menggunakan kendaraan berpendingin (*air conditioned*) maupun tidak. Mengingat dampak terhadap kesehatan memberikan kontribusi 90% dari total kerusakan, kerugian ekonomi akibat pencemaran udara hampir selalu dihitung berdasarkan biaya kesehatan. Beberapa studi di wilayah Jakarta dan sekitarnya menghitung kerugian ekonomi akibat pencemaran udara, yaitu:

- a. Studi *Urban Air* (URBAIR) Bank Dunia (Shah *et al*) pada tahun 1997 mengestimasi kerugian ekonomi akibat pencemar PM₁₀ and Pb yang mencapai Rp 1 triliun.
- b. Studi Asian Development Bank (Syahril *et al*) pada tahun 2003 memprediksi kerugian ekonomi akibat pencemar PM₁₀, NO₂, dan SO₂ yang berturut-turut mencapai Rp 4,2 triliun, Rp 132,7 miliar, dan Rp 4,3 triliun pada tahun 2015 jika tidak dilakukan pengendalian pencemaran udara.

Sementara itu, kajian mengenai dampak pencemaran udara pada tanaman dan bangunan (terutama monumen dan bangunan bersejarah) belum banyak dilakukan di Indonesia. Dampak pencemaran udara yang penting lainnya adalah pada ekosistem, yaitu penipisan

lapisan ozon stratosfer dan pemanasan global yang dapat menimbulkan perubahan iklim.

Kondisi Air Tanah

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (natural resources depletion). Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.

Menurut catatan Lubis (2008:143), pada tahun 1957 terdapat kira-kira 275.000 orang hidup dalam kondisi sanitasi buruk (jumlah penduduk saat itu kira-kira 1-2 juta jiwa). Sejak tahun 1950-an kali dan kanal di Jakarta banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).

Hasil pemantauan yang dilakukan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta terhadap 48 sumur yang tersebar di lima wilayah pada Oktober 2004 menunjukkan, air tanah di Jakarta memiliki kandungan pencemar organik dan anorganik tinggi. Akibatnya, air tanah di wilayah Jakarta tidak sesuai lagi dengan baku mutu peruntukannya, terutama air minum.

Berdasarkan ketinggian tanah, pada region pertama dari sumur yang dipantau, di antaranya masuk kategori cemar berat, yaitu di kawasan Pademangan, Penjaringan, Cilincing (ketiganya di Jakarta Utara), serta Kemayoran (Jakarta Pusat). Pada region kedua dan ketiga, dari 21 sumur yang dipantau, tiga sumur masuk kategori cemar berat, yaitu Cengkareng dan Kalideres (Jakarta Barat), serta Pulo Gadung (Jakarta Timur). Kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan industri dan permukiman padat (Kompas, 20 Juni 2005)

Di Jakarta Utara, baru 50% warganya yang terlayani dengan air bersih dari perusahaan daerah milik Pemda Jakarta tersebut. Selebihnya dipaksa untuk membeli air bersih dari para tukang air keliling. Tentunya dengan harga mencekik. Dari publikasi tentang "Kualitas Air di DKI Jakarta oleh FKM-UI melalui www.anakui.com (9

Januari 2008), dikemukakan hasil pemantauan BPLHD DKI Jakarta pada tahun 2004 bahwa di 66 lokasi yang tersebar di 13 sungai, menunjukkan seluruh lokasi tersebut tidak layak dijadikan sumber air minum. Menurut hasil penelitian Nurhayati pada tahun 2004 yang dikutip FKM-UI mengungkapkan bagian hulu sungai Ciliwung yang biasa digunakan sebagai air baku air minum pun telah mengandung kadar BOD rata-rata 8,97mg/L dan COD dengan kadar rata-rata 35,22mg/L. Padahal baku mutu BOD 10mg/L dan COD 20mg/L. Dari website yang sama dikemukakan pula, bahwa data pemantauan yang dilakukan Kantor Lingkungan Hidup, menyebutkan pencemaran air 55% disebabkan limbah domestik yang ditandai dengan tingginya kandungan coliform dan fecal coli.

Kondisi ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan USAID Indonesia melalui harian Kompas 27 Maret 2007, yang menyebutkan bahwa 63% air tanah di Jakarta tercemar E coli. Dalam harian yang sama, pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa tingkat pencemaran E.coli telah mencapai 80%. Dari hasil penelitian Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan disebutkan bahwa bahwa intrusi air laut tersebut hampir merata di seluruh wilayah Jakarta. Di mana wilayah kota dalam radius 10 kilometer pada umumnya telah dilanda intrusi air laut, seperti daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat dan wilayah Segi Tiga Emas Setiabudi, Kebayoran Baru, Cengkareng dan Senen Jakarta Pusat. (Suara Pembaharuan 23 Juni 2005). Padahal, 20 tahun lalu luas daratan yang terkena intrusi air laut baru sekitar dua kilometer dari garis pantai khususnya di daerah Kota, Jakarta Barat. Akibatnya, banyak sebagian penduduk Jakarta tidak lagi dapat menikmati air tanah (bersih). Menurut Partowijoto Ketua Himpunan Ahli Teknik Tanah & Air, jika keadaan ini tidak dikendalikan, maka pada tahun 2011 air tanah di DKI Jakarta akan habis (Bianpoen 2006). Air tanah berkurang diakibatkan oleh pengambilan yang tidak terkendali. Menurut Herlambang yang dikutip dalam Bianpoen (2006) bahwa pengambilan air tanah saat ini mencapai 6900liter/detik, padahal cara aman pengambilan air tanah adalah 3600liter/detik.

Akibatnya, selain terjadi intrusi air laut, juga terjadi penurunan muka tanah. Sekarang saja menurut Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Jakarta sejumlah wilayah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara seperti Jalan RE Martadinata, Ancol atau di kawasan pusat perbelanjaan ITC Mangga Dua beberapa lokasinya telah mengalami penurunan tanah.

Tercatat sedikitnya 300 titik lokasi penurunan tanah (Suara Pembaharuan 23 Juni 2005).

Menurut Abidin yang dikutip dalam Bianpoen (2006) bahwa di Jakarta Utara terjadi penurunan tanah sekitar 34 cm per tahun dan khusus di Pantai Mutiara penurunan tanah rata-rata 58 cm per tahun. Kondisi tersebut, menurut Bianpoen (2006) terjadi di lahan kota Jakarta yang memang sudah berada pada 80 cm di bawah permukaan laut, dengan kata lain, bahwa tanah di Jakarta Utara sedang tenggelam.

Limbah Cair

Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Kota Jakarta tidak memiliki sistem pengolahan limbah cair domestik, akibatnya setiap hari 7000 m³ limbah cair dari rumah tangga masuk ke sungai (Bianpoen 2006). Menurut laporan harian Kompas, 20 Juli 2004 bahwa terdapat 800 industri di pantai Jakarta, di mana 70% diantaranya membuang limbah langsung ke laut tanpa pengolahan apapun. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustaruddin *et al* (2006) bahwa pada tahun 2003 diperoleh tingkat konsentrasi Hg di perairan umum Cakung sebesar 0,0131 ppm atau telah melebihi baku mutu Hg air golongan C (PP-RI No.82 tahun 2001). Akibatnya tidak layak dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan. Pencemaran di perairan Cakung disebabkan karena perairan ini menjadi lokasi sasaran pembuangan limbah industri. Semuanya itu berakibat kepada pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

Kondisi kualitas air sungai di kota Jakarta kini sangat memprihatinkan. Dari data Pdpersi yang dipublikasikan melalui www.vita-insani.co.id diperoleh bahwa lebih dari 80% sampah di Jakarta langsung di buang ke 13 aliran sungai dan akhirnya sampah itu bermuara di perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berdasarkan data dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal), tingkat pencemaran di teluk Jakarta hingga Kepulauan Seribu saat ini dalam kondisi sangat kronis. Setidaknya 83% dari 13 daerah anak sungai dan sembilan kawasan muara sungai kini masuk dalam kategori

tercemar berat. Pencemaran di Teluk Jakarta akibat limbah organik dan logam berat telah melampaui ambang batas sejak tahun 1972 dan cenderung terus meningkat. Pencemaran Teluk Jakarta Lampau Ambang Batas (Kompas, 27 September 2002). Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomi, di samping nilai ekologi dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan financial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung ongkos, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar.

Daya Dukung

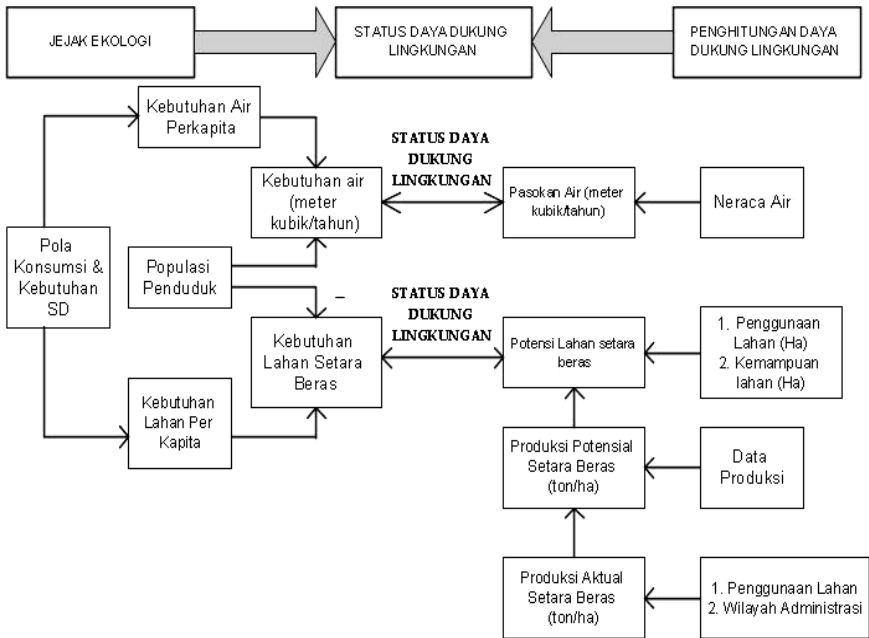
Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Menurut Soemarwoto (2001), daya dukung lingkungan adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah itu. Sedangkan menurut Lenzen yang dikutip dalam Anonim (2008) bahwa kebutuhan hidup manusia dari lingkungan dapat dinyatakan dalam luas area yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia. Luas area untuk mendukung kehidupan manusia ini disebut jejak ekologi (*ecological footprint*). Lenzen menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, kebutuhan hidup manusia kemudian dibandingkan dengan luas aktual lahan produktif.

Pada prinsipnya bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Oleh karena itu pemanfaatan ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan standar kualitas lingkungan dan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Perbandingan antara jejak ekologi dengan luas aktual lahan produktif ini kemudian dihitung sebagai perbandingan antara lahan

tersedia dan lahan yang dibutuhkan. Menurut Anonim (2008) bahwa pendekatan perhitungan daya dukung lingkungan melalui pendekatan daya dukung aspek lahan dan air, yaitu: (a) Analisis daya dukung lahan, yaitu penghitungan kebutuhan lahan dibandingkan dengan penghitungan lahan tersedia; dan (b) Analisis daya dukung air, yaitu: daya dukung DAS dalam menyediakan air ditentukan untuk satuan/tingkat DAS dari asupan curah hujan, yang menentukan jumlah air permukaan (lebih air hujan) maupun air bawah permukaan (lengas tanah dan airbumi sebagai air tertahan). Melalui pendekatan ini, dapat diketahui secara umum apakah daya dukung suatu wilayah masih dalam keadaan aman, waspada, atau sudah terlampaui, dengan melihat standar status daya dukung lingkungan suatu wilayah (Tabel 26).



Gambar 26. Skema penentuan status daya dukung lingkungan (Sumber: dimodifikasi dari Bahan Presentasi “Daya Dukung Lingkungan” oleh Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam RAKERNAS AMDAL 2008 www.scribd.com/doc/4101438/Rakernas-AMDAL-2008-Daya-Dukung)

Tabel 25. Penetapan status daya dukung lingkungan suatu wilayah

Perbandingan <i>supply/demand</i>	Status daya dukung lingkungan
>2,0	aman (<i>sustained</i>)
1,0 - 2,0	aman bersyarat (<i>conditionally sustained</i>)
< 1,0	terlampau (<i>overshoot</i>)

Sumber: Bahan Presentasi “Daya Dukung Lingkungan” oleh Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam RAKERNAS AMDAL 2008. www.scribd.com/doc/4101438/Rakernas-AMDAL-2008-Daya-Dukung

Dari Rakernas AMDAL 2008, dilakukan uji coba perhitungan daya dukung lingkungan terhadap 10 wilayah melalui suatu metode yang dijabarkan pada skema penentuan status daya dukung lingkungan (Gambar 26). Diperoleh bahwa daya dukung lahan dan daya dukung air wilayah DKI Jakarta telah terlampaui (Tabel 27). Artinya, kondisi lingkungan wilayah DKI Jakarta kini telah melampaui kemampuan untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Apabila, dianalogikan Kota Jakarta sebagai suatu bangunan gedung, maka bangunan gedung tersebut sudah melebihi persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban muatan.

Di mana kemampuan struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk mendukung beban muatan yang timbul akibat perilaku alam. Besarnya beban muatan dihitung berdasarkan fungsi bangunan gedung pada kondisi pembebanan maksimum dan variasi pembebanan agar bila terjadi keruntuhan pengguna bangunan gedung masih dapat menyelamatkan diri.

Tabel 26. Hasil Uji Coba Perhitungan Daya Dukung Lingkungan

No.	Wilayah	Daya Dukung Lahan	Daya Dukung Air
1	Prop. SulSel	1,8 (Aman Bersyarat)	3,74 (Aman)
2	Jawa Barat	0,64 (Terlampaui)	0,36 (Terlampaui)
3	DKI	0,01 (Terlampaui)	0,08 (Terlampaui)
4	Jawa Timur	1,12 (Terlampaui)	0,65 (Terlampaui)
5	Jawa Tengah	0,6 (Terlampaui)	0,44 (Terlampaui)

Lanjutan tabel 26

No.	Wilayah	Daya Dukung Lahan	Daya Dukung Air
6	Kab. Cirebon	(tidak dihitung)	0,21 (Terlampau)
7	Kab.Kuningan	(tidak dihitung)	0,46 (Terlampau)
8	Kab. Indramayu	(tidak dihitung)	0,32 (Terlampau)
9	Kab. Majalengka	(tidak dihitung)	0,41 (Terlampau)
10	Kota Cirebon	(tidak dihitung)	0,05 (Terlampau)

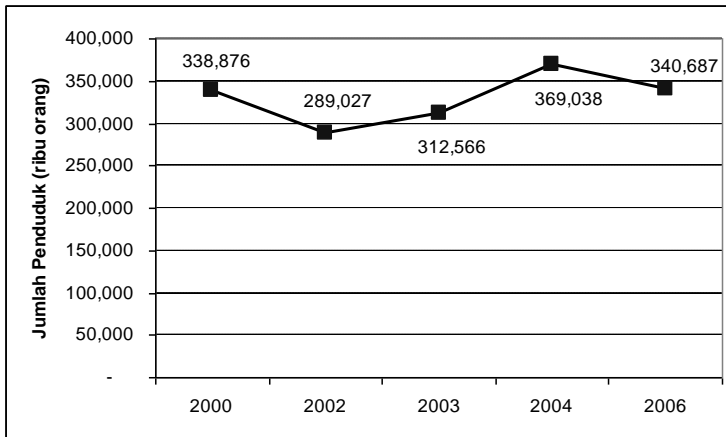
Sumber: Bahan Presentasi "Daya Dukung Lingkungan" oleh Asisten Deputi Urusan Pengawasan dan Evaluasi Lingkungan Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam RAKERNAS AMDAL 2008.

4.2. Potret Kemiskinan di Kota Jakarta

Kemiskinan mendominasi sebagian besar masyarakat Kota Jakarta sejak kota ini menjadi kota Batavia. Sejak kemerdekaan budak di kota Batavia (Jakarta) menjadi budaya masyarakat urban Batavia pada abad ke 16. Apalagi manakala epidemi lepra menyerang para budak di akhir tahun 1670, pemerintah melakukan pembebasan budak-budak yang tertular lepra demi menghindari ongkos pengobatan (Niemeijer 2007:91). Menurut Niemeijer bahwa kemiskinan melonjak ketika terjadi kemerdekaan budak di Batavia, hingga kemerdekaan budak akibat epidemi lepra.

Menurut catatan Firman Lubis (2008:63) bahwa kehidupan masyarakat pada tahun 1950-an, jelas terlihat perbedaan kaya dan miskin, dan menjadi semakin dalam sejak terjadinya pembangunan pada tahun 1970-an. Istilah "gedongan" dan "orang kampung" menjadi istilah ketika itu, untuk membedakan golongan kaya dan miskin Lubis (2008:113). Penentuan istilah ini menurut Lubis ditentukan oleh lingkungan tempat tinggal rumah mereka. Jumlah penduduk miskin kota Jakarta dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006, relatif stabil dan tidak terjadi perbedaan yang signifikan (Gambar 27). Pada tahun 2000 penduduk miskin berjumlah 338.876.000 orang, dan pada tahun 2006 menjadi 340.678.000 orang. Dari periode 2000-2006, pertumbuhan rata-rata penduduk miskin 1- 1,2% setiap tahun.

Pada prinsipnya, kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Kota Jakarta, adalah tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tidak memiliki kemampuan dasar manusiawi untuk menunjang keberlanjutan hidup. Secara detil, kemiskinan tersebut, dirincikan ke dalam beberapa dimensi yang diambil dari 9 dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI (2001), yang kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (i) ketidakmampuan; (ii) ketiadaan akses; dan (iii) kerentanan terhadap guncangan.



Gambar 27. Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta (2000-2006)
(sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta)

4.2.1. Ketidakmampuan

Penduduk miskin kota Jakarta, tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar papan. Mereka tidak mampu membeli sarana tempat tinggal bagi dirinya dan keluarganya. Untuk memenuhi keberlanjutan hidup di Kota Jakarta, penduduk miskin hidup dan tinggal di lokasi-lokasi tertentu, yang biasanya dekat dengan lokasi tempat mereka mencari nafkah untuk makan dan menghidupi keluarganya. Berdasarkan laporan evaluasi keadaan rumah tangga miskin di DKI Jakarta (2001-2004), bahwa penduduk miskin di kota Jakarta menempati lokasi-lokasi, sebagai berikut: (i) kompleks real estate; (ii) perkampungan miskin; (iii) bantaran sungai & tepi jalan kereta; (iv) lainnya (kolong jembatan, dan lain-lain). Dari data

yang tersedia, hanyalah data jumlah penduduk miskin pada tahun 2002, 2003 dan 2004. Agar ketersediaan data sama dengan data perkembangan penduduk miskin secara umum dari BPS Provinsi DKI Jakarta, maka untuk data tahun 2005 dan 2006 peneliti melakukan estimasi jumlah penduduk (Tabel 26).

Tabel 27. Jumlah penduduk menurut lokasi rumah di DKI Jakarta tahun 2002-2004

Tahun	Komp. Real Estate	Perkampungan Miskin	Bantaran sungai & Tepi Kereta	Lainnya	Total
2002	437	70,678	10,691	1234	83,040
2003	346	70,081	9,033	1501	80,961
2004	760	80,853	7,778	1080	90,471
2005*	1669	93,281	6,697	777	102,424
2006*	3667	107,619	5,767	559	117,612

Sumber: Evaluasi keadaan rumah tangga miskin di DKI Jakarta, 2001-2004, *data estimasi

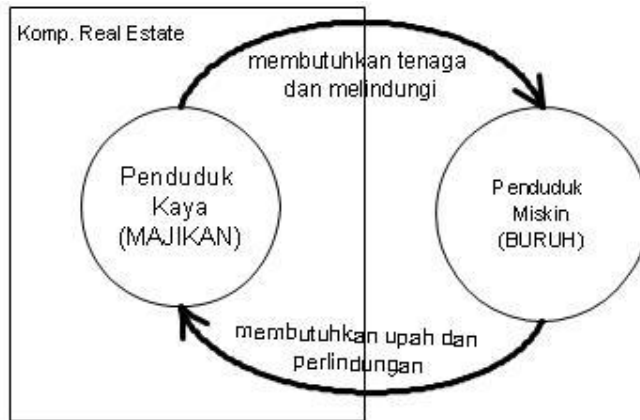
Dari data BPS dan estimasi tersebut, diperoleh bahwa: penduduk miskin yang menempati kompleks real estate dan perkampungan miskin (kumuh) akan terus meningkat dari tahun ke tahun (2002-2006). Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek, seperti:

Di Lokasi Kompleks Real Estate

Penduduk miskin akan banyak dibutuhkan oleh penduduk tidak miskin yang tinggal di kompleks real estate. Mereka membutuhkan masyarakat miskin sebagai tenaga pembantu rumah tangga, supir dan buruh bangunan. Apabila, penduduk di real estate semakin banyak, maka semakin besar peluang kerja bagi masyarakat miskin sebagai tenaga kerja bagi mereka. Dan kemungkinan digusur oleh pemerintah, masih lebih kecil kemungkinan dibandingkan penduduk miskin yang berada di perkampungan miskin, kawasan bantaran sungai, rel kereta dan lokasi lainnya. Hal ini disebabkan oleh interaksi yang terjadi antara masyarakat tidak miskin yang tinggal di real estate dengan masyarakat miskin. Masyarakat di kompleks real estate akan cenderung melindungi mereka, karena tenaga masyarakat miskin sangat dibutuhkan, selain upahnya rendah, juga masyarakat penggunanya tidak perlu menyediakan sarana tempat tinggal bagi para buruh tersebut.

Masyarakat miskin tersebut memerlukan upah, meskipun tidak sesuai dengan upah minimum kota atau berdasarkan negosiasi antara

majikan dan buruh. Upah tersebut dibutuhkan untuk dapat bertahan hidup di Kota Jakarta, karena masyarakat miskin tak lagi ingin pulang ke kampung halamannya. Karena menurut pemahaman mereka, bahwa di Jakarta adalah gudang pekerjaan yang dapat menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan bekerja di desa. Untuk itu mereka



Gambar 28. Interaksi antara Penduduk kaya (majikan) dan penduduk miskin (buruh)

memerlukan perlindungan dari majikannya. Majikan pengguna tenaga mereka dapat menyewa tenaga keamanan untuk menjaga kerjasama tersebut, agar awet dan dapat berjalan dengan baik (Gambar 28).

Ada juga yang bekerja sebagai pengaman lalu lintas atau "polisi cepek" khusus untuk perumahan real estate tersebut, meskipun penduduk miskin tersebut tak memiliki tempat tinggal tetap, namun dia tetap senang melakoni pekerjaan tersebut.

"Di Jakarta, setidaknya saya punya peluang. Saya tidak akan pulang sebelum berhasil," tutur Iwan, seorang pemuda pengangguran berusia sekitar 20-an yang sehari-hari mengisi waktunya dengan menjadi "Polisi Cepek" di sebuah pertigaan di kawasan Rawa Sari, Jakarta Pusat (Harian Kompas, Sabtu, 18 Juni 2005).

Jika penghuni real estate meningkat, berarti meningkat pula kebutuhan akan pekerja rumah tangga atau pekerja lain yang berupah rendah. Jadi, luas total hunian para penduduk miskin di samping real estate akan cenderung meningkat (Tabel 26).

Tabel 28. Luas Total Tempat Penduduk Rumah Tangga Miskin Bermukim di DKI Jakarta (2002-2006)

Tahun	Komp Real Estate	Per kampungan Miskin	Bantaran Sungai & Tepi jalur Kereta	Lainnya	Total
	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)	(m ²)
2002	3496	565424	96,219	9872	675011
2003	2768	560648	81,297	12008	656721
2004	6080	646824	70,002	8640	731546

Perkampungan Miskin

Penduduk miskin di perkampungan miskin cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terancam sewaktu-waktu mereka akan tergusur. Biasanya lokasi perkampungan miskin berada di pusat kota dekat dengan pusat kegiatan ekonomi kota (Gambar 29). Luas lahan yang ditempati penduduk miskin di lahan perkampungan kumuh akan cenderung meningkat dari tahun ke tahun seperti pada tabel 29. Ini disebabkan oleh kegiatan perekonomian di kota Jakarta semakin meningkat pesat, sehingga para penduduk pemukiman kumuh bekerja sebagai buruh pada bangunan-bangunan perkantoran, pertokoan dan apartemen di sekitar tempat tinggal mereka. Kondisi hunian yang tidak memiliki sarana MCK yang memadai, serta ukuran ruang-ruang sebagai tempat hidup dan berkembang sebagai manusia sangat tidak memadai (Gambar 30).

Bantaran sungai dan tepi rel kereta

Bantaran sungai merupakan kawasan lindung, artinya kawasan yang dilindungi pemerintah karena memiliki kemiringan tertentu dan merupakan daerah aliran sungai (tempat penyerapan air hujan sebelum masuk ke badan air). Selain sebagai fungsi untuk menahan air, juga berfungsi sebagai konservasi dan pencegah erosi. Oleh karena itu area ini tidak untuk dibangun bangunan jenis apapun. Namun, masyarakat miskin perkotaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar papan atau hunian, cenderung memilih lokasi tersebut sebagai area hunian mereka. Selain lahan terlihat tak dimiliki siapapun, lahan ini juga dekat dengan sumber air sungai. Lahan-lahan di bantaran sungai di kota Jakarta, banyak dihuni secara liar oleh penduduk miskin kota (Gambar 31).

Demikian pula dengan wilayah “tak bertuan” lainnya seperti lahan di tepi rel kereta (Gambar 32). Padahal lahan ini sengaja dibiarkan pada ukuran lebar tertentu untuk tidak digunakan, dalam upaya memberikan keamanan bagi kereta maupun masyarakat sekitarnya. Namun, justru lahan inilah yang menjadi lokasi hunian masyarakat miskin kota. Selain dalam memperoleh lahan tersebut gratis, juga dapat berjualan dengan cara menawarkan langsung pada pelanggan yang baru turun dan yang akan naik ke kereta (dekat dengan konsumen). Dengan demikian mendapatkan uang lebih cepat.

Lain-lain

Lokasi hunian penduduk miskin lainnya, seperti di bawah kolong jembatan di sungai, juga di kolong jembatan jalan-jalan tol (Gambar 33). Di mana lahan-lahan ini tidak tertata sehingga terlihat tidak ada yang memiliki atau bertanggungjawab dengan lahan tersebut. Karena itulah penduduk miskin, mendirikan rumah-rumah dari bahan yang tidak tahan lama di arena tersebut. Jumlah penduduk di lahan ini dan luas lahan yang ditempati akan cenderung menurun, hal ini disebabkan oleh penertiban yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta.

Ketidakmampuan masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar papan, juga mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan mereka mendapatkan sumber daya alam yang berkualitas, seperti air bersih dan udara bersih. Ini disebabkan lokasi tempat mereka tinggal, yang tidak dilayani oleh sistem sanitasi kota. Sehingga mereka menggunakan air sungai sebagai sumber kehidupan sehari-hari mereka untuk mandi, cuci dan kakus (MCK). Akibatnya merekapun rentan terhadap bahaya penyakit seperti terserang diare akibat bakteri *ecoli* dalam air yang mereka gunakan sebagai air bersih. Juga penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan udara bersih seperti TBC. Menurut dokter spesialis penyakit dalam RSMH Palembang, dr. Zen Ahmad, SpPD (paru) (Sriwijaya Post, 15/08 2007) bahwa penyakit paru-paru terjadi akibat kondisi udara yang lembab. Di mana sistem saluran pernapasan terganggu akibat kuman dan virus yang berkembang di ruangan yang tingkat kelembaban tinggi yang masuk melalui saluran pernapasan.



Gambar 29. Perkampungan Miskin yang berdampingan dengan pusat kegiatan ekonomi di Kota Jakarta



Gambar 30. Perkampungan Miskin di Kota Jakarta (gambar 1 di kelurahan Cikini, gambar 2 di Kelurahan Petojo, gambar 3 di Kelurahan Pegangsaan dan gambar 4 di salah satu area di Central Business District Sudirman Jakarta)



Gambar 31. Masyarakat Miskin di Rel Kereta di Kota Jakarta



Gambar 32. Masyarakat Miskin di bantaran sungai di Kota Jakarta

Di Kota Jakarta, seperti di Jakarta Timur, menurut catatan Sudin Kesehatan Masyarakat Jaktim bahwa sampai dengan Mei 2005 jumlah penderita TBC berada pada kisaran 4.450 penderita dan jumlah penderita terbanyak berada di kawasan Jatinegara, yakni 701 penderita (Sinar Harapan 7 Juni 2005). Demikian pula di Jakarta pusat, warga yang terjangkit penyakit TBC dan sudah dilakukan pengobatan atau tertangani sekitar 3.028 orang (Sinar Harapan 7 Juni 2005).



Gambar 33. Penduduk Miskin yang bermukim di kolong jembatan tol di Kota Jakarta

4.2.1. Ketiadaan Akses

Penduduk miskin di kota Jakarta tidak memiliki akses terhadap: (i) sistem sanitasi kota, dan (ii) terhadap lapangan kerja yang berkesinambungan.

Tidak memiliki akses terhadap sistem sanitasi kota

Penduduk miskin di kota Jakarta bermukim di area pemukiman yang tidak dilayani oleh sistem pelayanan kota, seperti sistem sanitasi kota serta air bersih. Menurut Penelitian WHO yang dikutip dalam dalam berita website Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (www.distarkim.sundanet.com/index.php?a=7) yang diupload tanggal 13-10-2003, bahwa setidaknya ada 20-30 jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma yang hidup dalam air. Jenis penyakit

tersebut, antara lain: *Cholera, Hepatitis, Polimyelitis, Typhoid, Dysenteri Trachoma, Scabies, Malaria, Yellow-fever, dan Penyakit Cacing.*

Tidak memiliki akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan

Penduduk miskin kota Jakarta tidak memiliki akses terhadap lapangan kerja yang memberikan jaminan yang berkesinambungan bagi kehidupan mereka. Sebagian besar penduduk miskin bekerja pada jenis pekerjaan informal yang bergantung pada kebijakan majikan, bukan berdasarkan kebijakan negara (formal). Sedangkan sekitar 17,11% (tahun 2004) penduduk miskin bekerja sebagai buruh pabrik (Tabel 29). Jadi sekitar 83% penduduk miskin kota Jakarta tidak memiliki penghasilan yang berkesinambungan dalam hidupnya, ini berarti setiap saat mereka menjadi khawatir dengan pekerjaan yang mereka tekuni. Khawatir, sewaktu-waktu mereka akan dipecat atau dikeluarkan dari pekerjaan tersebut tanpa diberikan pedangon atau jaminan terhadap kehidupannya.

Tabel 29. Penduduk miskin usia 5 tahun ke atas yang mempunyai pendapatan menurut sumber pendapatan/penghasilan, 2002-2004

Sumber pendapatan/jenis pekerjaan	2002		2003		2004	
	Jumlah pddk	%	Jumlah pddk	%	Jumlah pddk	%
Buruh pabrik	30,736	26,43	22,627	20,27	23,227	17,11
Kuli bangunan	8,834	7,60	8,542	7,65	11,665	8,58
Pedagang makanan keliling	7,147	6,14	5,117	4,58	4,008	2,95
Buruh cuci	5,110	4,39	6,078	5,45	9,162	6,75
Pedagang warung makanan jadi	4,963	4,27	4,944	4,43	8,975	6,61
Pelayan toko/rumah makan	4,774	4,10	5,032	4,51	8,329	6,13
Sopir angkutan umum	4,334	3,73	3,473	3,11	4,031	2,97
Sopir pribadi	-	-	1,813	1,62	2,175	1,6
Penerima pendapatan/pensiunan	--	-	6,773	6,07	8,894	6,55
Pesuruh/pembersih kantor	-	--	2,473	2,22	-	-
Buruh tani/buruh nelayan	-	-	2,373	2,13		
Satpam /hansip	-	-	2,211	1,98	4,272	3,15

Lanjutan tabel 29

Sumber pendapatan/jenis pekerjaan	2002		2003		2004	
	Jumlah pddk	%	Jumlah pddk	%	Jumlah pddk	%
Nelayan/petani sayuran	-	-	2,180	1,95	3,428	2,52
Cleaning service	-	-	-	-	3,111	2,29
Pedagang kaki lima	3,442	2,96	3,030	2,71	-	-
Kuli angkut barang/pasir	-	-	2,205	1,98	3,084	2,27
Tukang ojek motor	2,606	2,24	3,273	2,93	5,108	3,76
Pemulung sampah	2,301	1,98	-	-	-	-
PNS	301	0,26	-	-	-	-
Pembantu rumah tangga	-	-	-	-	2,219	1,63
Pedagang asongan, PRT, penjahit, pesuruh, satpam, sopir pribadi, tukang sayur, petugas kebersihan	41,754	35,90	-	-	2,356	1,74
Lain-lain	-	-	29,480	26,41	29,385	21,64

Sumber: Evaluasi keadaan rumah tangga miskin di DKI Jakarta, 2002-2004

Kerentanan terhadap Penggusuran

Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal, seperti penggusuran. Ini disebabkan oleh lokasi tempat mereka bermukim adalah lokasi yang tidak diperuntukkan bagi permukiman masyarakat miskin, melainkan untuk masyarakat tidak miskin (real estate), wilayah yang dilindungi seperti jalur hijau dan bantaran sungai, kolong jembatan tol dan tepi rel kereta api, bahkan untuk bangunan-bangunan industri dan perdagangan. Sehingga sewaktu-waktu mereka akan tergusur demi untuk kepentingan rencana pembangunan kota. Berdasarkan laporan INFID, selama tahun 2001-2003 telah terjadi puluhan kasus penggusuran di Kota Jakarta, dan ratusan kasus kebakaran kawasan kumuh terjadi di Jakarta (Tabel 29). Kondisi ini menjadikan masyarakat miskin kota Jakarta sangat rentan terhadap kejadian-kejadian tersebut, yang justru lebih memposisikan kehidupan mereka pada posisi paling miskin di Kota Jakarta.

Tabel 30. Kasus Penggusuran di tahun 2001 - 2003

Tahun	Jumlah Kasus dan Korban	Alasan Penggusuran	Keterangan
2001	45 kasus penggusuran pemukiman: a. 6.588 rumah dan 5 sekolah dihancurkan b. 6.774 KK dan 34.514 jiwa kehilangan tempat tinggal 19 org mati, 67 org terluka, 50 org sakit, 1000 org depresi dan 4.252 org kehilangan pekerjaan.	Penegakan Perda 11/1988: a. pemukiman berada di jalur hijau, b. pemukiman berada di bantaran kali. c. Mencegah banjir. d. Lahan akan dijadikan lokasi bisnis	a. Penggusuran disertai dgn kekerasan & pembakaran yg melibatkan aparat pemda, preman, banpol, polisi dan TNI. b. Warga mendapat uang kerohiman sebesar Rp.25.000-Rp 500.000 /KK. c. Warga membeli tanah, dapat ijin tinggal dan bayar retribusi pd aparat pemda.
	54 kasus penggusuran PKL dan sedikitnya 2.700 PKL kehilangan tempat usaha dan barang dagangan, dgn kerugian mencapai Rp.540juta	Melanggar Perda 11/1988: berjualan di trotoar, jalur hijau/taman	a. Penggusuran disertai dgn kekerasan, perampasan dan penjarahan oleh aparat. b. Setiap hari, bulan dan tahun, PKL dipungut retribusi. c. Untuk ambil barang yg dirampas, PKL bayar Rp.40.000 - 50.000.
	Penggarukan becak dan 6000 jiwa kehilangan pekerjaan dan 3000 becak dirampas	Melanggar Perda 11/1988	Pemda keluarkan Rp 1,24 milyar utk gusur becak a. Becak rampasan diperjualbelikan aparat. b. Untuk menebus becak yg dirampas, pemilik becak bayar ke pemda Rp 2 juta utk 7 becak

Lanjutan tabel 29

Tahun	Jumlah Kasus dan Korban	Alasan Penggusuran	Keterangan
2002	26 kasus penggusuran pemukiman dan sedikitnya 4.908 rumah dihancurkan, 18.732 jiwa kehilangan tempat tinggal; 15 org luka, 11 org ditangkap dan ditahan	a. Melanggar Perda 11/1988 b. Lahan akan dijadikan lokasi usaha	Penggusuran disertai dgn kekerasan & pembakaran yg melibatkan aparat pemda, preman, banpol.
	20 kasus penggusuran pedagang kaki lima (PKL) dan sedikitnya 7.770 lapak dan kios PKL dihancurkan	Melanggar Perda 11/1988: berjualan di trotoar, jalur hijau/taman	a. Penggusuran disertai dgn kekerasan, perampasan dan penjarahan oleh aparat b. Setiap hari, bulan dan tahun PKL dipungut retribusi b. Untuk ambil barang yg dirampas, PKL bayar Rp 40.000 - 50.000
	591 kasus kebakaran dan pembakaran: a. 71% (424 kasus) pembakaran/kebakaran pemukiman kumuh b. 29% (168 kasus) pembakaran/kebakaran tempat usaha dan fasilitas publik, di antaranya 18 pasar tradisional, 12 fasilitas umum dan 6 fasilitas sosial.		Pembakaran adalah salah satu modus penggusuran pemukiman kumuh dan pasar tradisional. Ini ditandai oleh larangan untuk membangun kembali atau sulitnya pedagang masuk ke pasar yg sama setelah pasar berubah menjadi pasar modern
	Operasi Yustisi: 826 terkena razia KTP DKI	Melanggar Perda no. 1/1996 tentang kependudukan	a. Kaum miskin sulit dapatkan KTP DKI b. Yg terkena razia bayar denda Rp.10.000-20.000

Lanjutan tabel 30

Tahun	Jumlah Kasus dan Korban	Alasan Penggusuran	Keterangan
2003	15 kasus penggusuran Pemukiman dan sedikitnya 7.280 KK kehilangan tempat tinggal 1 org mati 1 gadis, 13 th, diperkosa aparat 20 orang terluka 26 org ditangkap	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan proyek banjir kanal b. Normalisasi kali c. Lahan akan dipakai lokasi bisnis d. Lahan akan dipakai perumnas e. Menegakkan Perda 11/1988 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sebagian besar tidak mendapat ganti rugi. b. Sebagian kecil terima Rp. 250.000/kk c. Penggusuran disertai dengan kekerasan, penjarahan dan pembakaran yg melibatkan aparat pemda,banpol, polisi, TNI dan preman d. Warga sudah membeli tanah padah pengelola dan pemerintah setempat.

Sumber: Dimodifikasi dari Tulisan Menata Kembali Hak Warga Negara: Belajar dari Kasus